

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN SOEHARTO
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PADA REPELITA I (1968-1973)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

Ari Trijayanti

NIM : 031314034

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2008

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN SOEHARTO
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PADA REPELITA I (1968-1973)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

Ari Trijayanti

NIM : 031314034

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2008

SKRIPSI

PERANAN SOEHARTO

DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PADA REPELITA I (1968-1973)

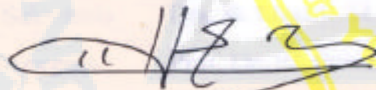
Oleh :

Ari Trijayanti

NIM : 031314034

Telah disetujui oleh :

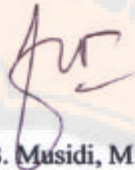
Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 13 Agustus 2008

Pembimbing II



Drs. B. Musidi, M.Pd.

Tanggal 13 Agustus 2008

SKRIPSI

**PERANAN SOEHARTO
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PADA REPELITA I (1968-1973)**

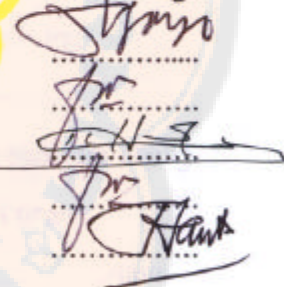
Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Ari Trijayanti
NIM : 031314034

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 28 Agustus 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota	Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 28 Agustus 2008
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Tarsisius Sarkim
Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kepada Allahku yang Esa
Karya ini ku persembahkan untuk
Kedua Orangtuaku, Mbak Rina, Mbak Etik, Adekku Bayu dan
Tiga sahabatku Gantang, Herno, dan Kristiono,
yang selalu menyayangi dan banyak
Memberikan Doa dan Support dalam hidupku
Kenangan demi kenangan tlah kulalui
Waktu kian menjejarku, begitu pula umurku
Perjalanan panjangku tlah ku isi
Dengan hari-hari yang menyenangkan, menyedihkan
Ratapan, tangisan, gurauan, dan candapun mengisi keseharianku
Namun kini aku harus menatap lebih jauh lagi
Tuh bisa raih apa yang ku inginkan...
Dengan di akhirnya tugas ini ku berharap akan menjadi orang
Yang lebih berguna bagi diriku ataupun orang
Yang mencintai dan menyayangiku.....Amin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

"Ketika kita tidak dapat mengungkapkan doa lewat kata-kata percayalah Allah mendengar seruan hati kita".

"Dalam perjalanan hidup manusia untuk mencapai sesuatu dibutuhkan Kemauan, kerja keras, ketekunan dan yang terutama adalah Doa. Setelah itu waktu yang akan menjawab semua cita-cita kita".

Renungan

Di saat ku memohon pada Allah kekuatan, Allah memberikan kesulitan agar aku menjadi kuat.

Di saat ku memohon pada Allah kebijakan, Allah memberiku masalah untuk dipecahkan.

Di saat ku memohon pada Allah kesejahteraan, Allah memberiku akal untuk berfikir.

Di saat ku memohon pada Allah keberanian, Allah memberiku rintangan untuk ku atasi.

Di saat ku memohon pada Allah sebuah cinta, Allah memberiku orang-orang bermasalah untuk ku tolong.

Di saat ku memohon pada Allah bantuan, Allah memberiku kesempatan

Aku tidak merasa menerima apa yang ku minta tapi aku menerima segala yang kubutuhkan

Doaku terjawab sudah
Alhamdulillah Robbil'alamin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : **Ari Trijayanti**
Nomor Mahasiswa : **031314034**

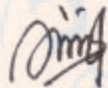
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :
PERANAN SOEHARTO DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PADA REPELITA I (1968-1973)
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 11 September 2008

Yang menyatakan



(Ari Trijayanti)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

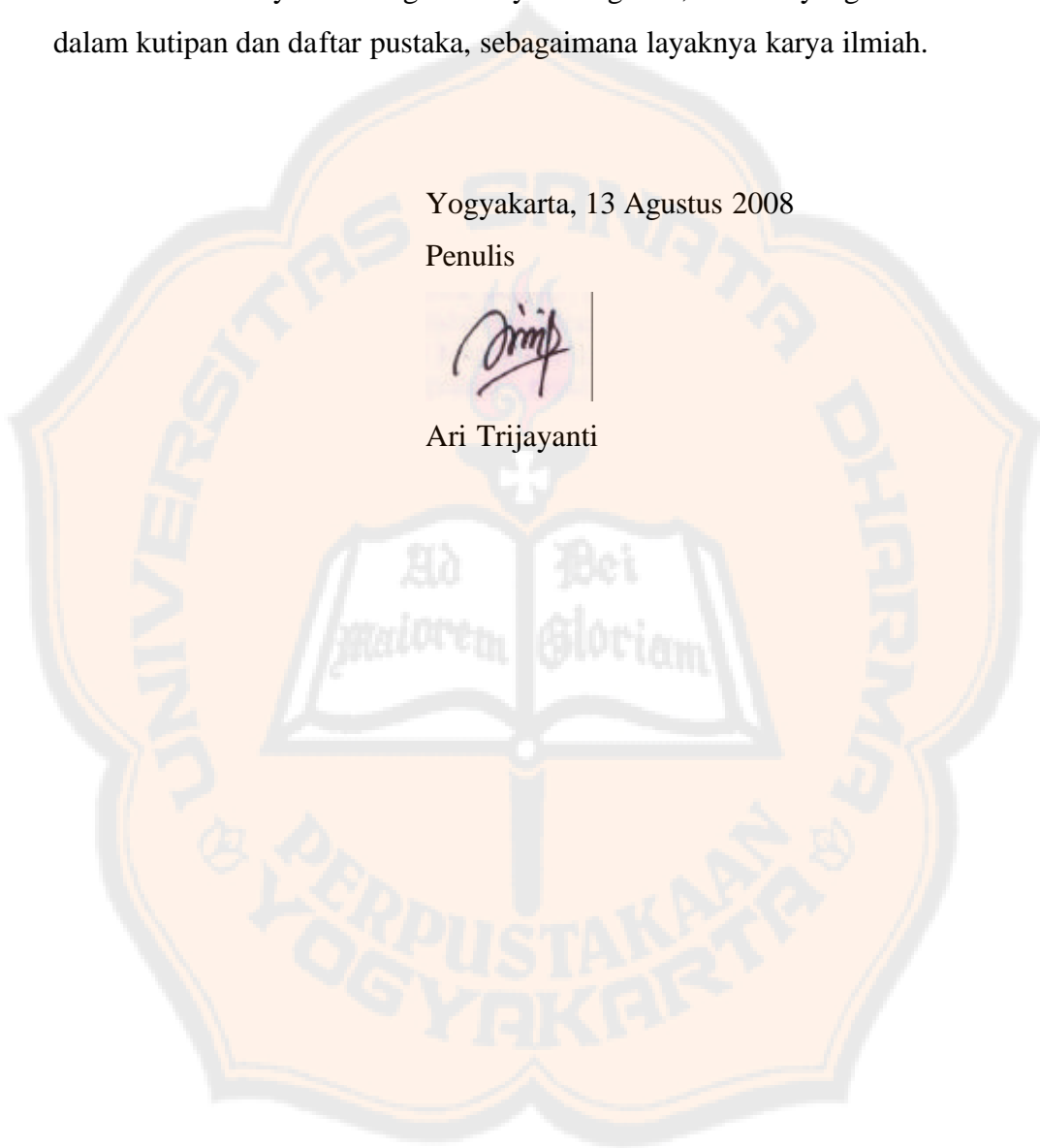
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 13 Agustus 2008

Penulis



Ari Trijayanti



ABSTRAK

Ari Trijayanti. Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : 1) latar belakang sosial ekonomi Soeharto, 2) kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial, dan 3) sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode historis, pendekatan multidimensional, dan ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah 1) bahwa Soeharto adalah seorang anak petani yang mempunyai tekad untuk maju dan berpendidikan rendah serta mampu memimpin bangsa Indonesia dengan baik, 2) Soeharto mampu memperbaiki segala kehidupan bangsa Indonesia, khususnya bidang ekonomi dengan mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri yang jumlahnya sudah melebihi \$ 2,400 juta dan menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan 3) sumbangan Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973) tampak dari usahanya untuk meningkatkan produksi pangan dengan menyediakan pupuk, insektisida, pestisida, dan bahan kimia lainnya.

ABSTRACT

Ari Trijayanti. The Role of Soeharto in Indonesian Economic Development at the First Year of Five Year Development Plan (1968-1973)

The purpose of this paper is to give a description and analyze : 1) the social and economic background of Soeharto, 2) the policy of Soeharto in the first year of five year Development Plan (1968-1973) at economic and social sectors, and 3) contribution of Soeharto in the first year of five year Development Plan (1968-1973) at economic and social sectors.

The method of this research is historical method by applying multidimensional approach. It is an analytical descriptive research.

The results of this research are : 1) Soeharto is a farmer's son who has got low education but he has got high spirit to improve his life and finally he is able to lead Indonesia people well, 2) Soeharto is able to improve all aspects of Indonesian people's lives, especially in economic sectors by rescheduling of paying foreign debt which is more than \$ 2,400 millions and he creates the mechanism how to overcome the inflation by improving the infrastructure and developing Indonesian economy, 3) the contribution of Soeharto in developing the Indonesian economy in the first year of five year Development Plan (1968-1973) can be seen in his effort in increasing the food production by supplying fertilizer, insecticide, pesticide, and the other of organic substance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973)*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Pendidikan Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H. selaku dosen pembimbing I yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis hingga selesai.
5. Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis hingga selesai.
6. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, M.M. selaku dosen penguji skripsi.
7. Seluruh dosen Pendidikan Sejarah dan petugas sekretariat khususnya Mas Robertus Marsidiq dan Mas Tri (sekretariat ilmu sejarah) yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
8. Seluruh petugas perpustakaan yang telah banyak membantu penulis menemukan buku-buku dalam rangka penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak **Sriyono S.Pd.** dan Ibu **Sudiyah** yang telah memberikan kasih sayang, semangat, doa, nasehat, dukungan dan pengorbanan yang sangat besar tanpa batas.
10. Mbak **Rina Nur Eka Wati S.Pd.**, Mbak **Etik Dwi Winarti S.Pd.**, Mas **Ida Bagoes Oka S.E.** & Adekku **Bayu Pamungkas** atas doa, semangat dan nasehatnya.
11. Buat sahabat terbaikku **Kristiono, Gantang & Herno** yang selalu memberi masukan, dukungan dan perhatian yang sangat berarti. Aku berharap persahabatan kita bakal terus sampai kapan pun.
12. Buat teman-teman pendidikan sejarah 2003 : Dwi, Vitha, Yayuk, Tata, Betha, Aan, Bahlul, Tedjo, Ariyanto, Mas Nyoman Sudarsana, Mas Timur Pamenang, Mas Ardi, Mas Rosario (Ilmu Sejarah), Mas Bayu, Mas Logi, Mas Sigit, Mas Bram, Mas Fantri, Mbak Odhy, Mbak Iin, Mbak Retno, (alm) Mbak Martha, Mbak Arga, Mbak Indri, Mbak Nola, Mbak Hesti, Dek Rendra, Dek Vera, Dek Wawan, Dek Agus “Gendak”, Dek Yus, Dek Doni, Dek Disna, Dek Tsani, Dek Atik, Dek Exna, Dek Choi, Dek Early, Dek Natali, Dek Merita, Dek Evan (putra dari Mas Sidiq) dan masih banyak teman-teman yang tidak disebut terima kasih atas diskusi, curhat, dan kerjasamanya selama ini.
13. Teman-teman kos Amelia Jl. STM Pembangunan No.20 F terima kasih atas persaudaraan dan bantuan yang telah diberikan
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan pemikiran, saran maupun kritik yang bertujuan untuk menyempurnakan tulisan ini.

Penulis

Ari Trijayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAM PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kajian Teori.....	11
G. Hipotesis	16
H. Metodologi Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LATAR BELAKANG SOSIAL EKONOMI SOEHARTO ..	24
A. Latar Belakang Pendidikan	24
B. Latar belakang perjalanan karier Soeharto	28
BAB III KEBIJAKAN SOEHARTO DALAM	
 REPELITA I (1968-1973) DI BIDANG EKONOMI,	
 DAN SOSIAL.....	41
A. Bidang Ekonomi	
1. Kebijakan Pangan.....	41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Kebijakan Fiskal.....	47
3. Kebijakan Penanaman Modal Asing	51
B. Bidang Sosial	
1. Keluarga Berencana	55
2. Transmigrasi.....	60
3. Tenaga Kerja	65
BAB IV SUMBANGAN SOEHARTO DALAM REPELITA I (1968-1973) DI BIDANG EKONOMI, DAN SOSIAL.....	69
A. Peningkatan Produksi Pangan.....	69
B. Kesejahteraan Rohani.....	71
BAB V KESIMPULAN	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83
SUPLEMEN.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto diri Presiden Soeharto	83
Lampiran 2 : Susunan Kabinet Pembangunan I.....	84
Lampiran 3 : Grafik perkembangan harga beras	87
Lampiran 4 : Tabel I harga beras bulanan di beberapa kota terpenting tahun 1968-1970.....	88
Lampiran 5 : Tabel II sumbangan dari berbagai unsur PDBM 1969-1970....	90
Lampiran 6 : Tabel III penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan pendidikan yang ditamatkan	92
Lampiran 7 : Gambar proses penyelenggaraan transmigrasi	93
Lampiran 8 : Tabel IV Sasaran Fisik Rencana Pembangunan Lima Tahun ..	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XLIX/1968.¹ Selama menjabat sebagai Presiden, Soeharto mulai mewujudkan tuntutan hati nurani rakyat dengan membenahi ekonomi yang kacau balau, yang pada waktu itu inflasi mencapai puncak sebesar 650% pada tahun 1966, volume perdagangan luar negeri merosot, dan beban pembayaran kembali hutang dengan luar lebih besar dari seluruh pendapatan yang ditinggalkan oleh rezim Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno.² Seperti yang telah diketahui bahwa rezim Orde Lama tidak mencatat kemajuan pembangunan yang berarti di bidang ekonomi. Selain itu bangsa Indonesia tetap miskin di tengah kekayaan alamnya, sehingga rakyat tetap menderita dan kebutuhan dalam hidup tidak terpenuhi.

Melihat situasi tersebut, Soeharto melakukan tindakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi khususnya pertanian. Hal ini dilakukan, karena ingin mensejahterakan rakyat Indonesia agar dapat hidup lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ia menekankan pentingnya Pelaksanaan Trilogi Pembangunan yang berisi: a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, b) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan c) stabilitas nasional yang sehat dan

¹ Lihat lampiran I (foto Presiden Soeharto), hlm. 83.

² Tjahyadi Nugroho, 1984: *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, Semarang, Yayasan Telapak, hlm. 187.

dinamis.³ Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian menjadi sasaran sentral dalam meningkatkan produksi pangan, seperti beras yang berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan adanya kemajuan di bidang pertanian, maka ikut mendorong sektor lain, seperti sektor industri yang menghasilkan bahan-bahan baku yang diperlukan oleh sektor pertanian, seperti pupuk, insektisida, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Dalam peningkatan produksi pertanian tersebut juga memerlukan kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian, seperti penggilingan padi. Penggilingan padi merupakan salah satu contoh dari hasil pembangunan industri yang terangsang pertumbuhannya berkat kemajuan produksi pertanian.⁴

Pertumbuhan ekonomi di bawah kekuasaan Soeharto boleh dikatakan telah berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 1970, Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tumbuh rata-rata dengan 7,5% per tahun dan merupakan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dalam 10 tahun terakhir.⁵ Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam 10 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai pertumbuhan di bidang-bidang lain dan berpengaruh luas dalam pelbagai sektor ekonomi yang kesemuanya itu telah menciptakan kesempatan penanaman modal yang makin berkembang.

Kesempatan penanaman modal di Indonesia terutama disebabkan oleh adanya pelbagai sumber alam dan sumber daya manusia. Selain itu sumber

³ Zulkarnaen Djamin, 1984: *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia, hlm. 37.

⁴ Soeharto, 1969: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, Jakarta, Yayasan Veteran Republik Indonesia, hlm. 379.

⁵ Soeharto: *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Pemerintah Orde Baru*, Bandung, PT. Harapan, *op. cit.*, hlm. 295.

pertanian di Indonesia yang sangat luas dengan kapasitas yang berskala besar baik untuk produksi bahan baku industri maupun bahan pangan dan produksi lainnya dapat diterima di pasar internasional. Penyebaran penanaman modal antar daerah di Indonesia menunjukkan bahwa 70% terdapat di Jakarta, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah.⁶ Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional ini, pemerintah Indonesia akan tetap berusaha meningkatkan partisipasi modal asing sebagai peranan yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi Indonesia.⁷

Peranan dan sumbangan penanaman modal asing di Indonesia tidak dapat dilihat dari nilai dolarnya saja, tetapi juga dalam pengalihan teknologi, pengetahuan manajemen, peningkatan kapasitas produksi nasional, penciptaan lapangan kerja dan kemampuan memasuki pasaran internasional yang kesemuanya itu turut menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.⁸ Dengan demikian, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dengan tugas Pokok Kabinet yang sejak pemerintahan Orde Baru dikenal dengan Kabinet Pembangunan I.⁹

Kabinet Pembangunan I ini menentukan Panca Krida sebagai program kerja sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPRS No.XLI/MPRS/1968 meliputi hal-hal sebagai berikut :¹⁰

⁶ Soeharto, 1970: *Lampiran Pidato Kenegaran Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret (1970)*, Jakarta, Departemen Penerangan Republik Indonesia, hlm. 78.

⁷ *Ibid.*, hlm. 296.

⁸ Soeharto: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Kedua*, *op. cit.*, hlm. 296.

⁹ Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia, Nazaruddin Sjamsuddin, 1992: *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1969-23 Maret 1973*, Jakarta, PT. Citra Lamtara Gung Persada. Secara lengkap lihat susunan Kabinet Pembangunan I, hlm. 84-86.

¹⁰ Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, 1984: *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I-Pelita II-Pelita III*, Jakarta, PT. Dumas Sari warn, hlm. 3.

- a. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilu.
- b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilu.
- c. Melaksanakan pemilihan umum sesuai Ketetapan MPRS No. XLII/MPR I/ 1968.
- d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September 1965 dan setiap rongrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
- e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.

Maka dengan terciptanya Panca Krida sebagai program kerja, bangsa Indonesia diharapkan dapat tinggal landas untuk mendorong pembangunan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang sosial ekonomi Soeharto ?
2. Bagaimana kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial ?
3. Apa sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

¹¹ Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 259.

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis latar belakang sosial ekonomi Soeharto.
2. Untuk menganalisis kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial
3. Untuk mendeskripsi dan menganalisis sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.

D. Manfaat Penulisan

Adapun dari penulisan skripsi yang berjudul Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973), diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan melengkapi karya tulis ilmiah di Universitas Sanata Dharma

2. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini dapat menambah wawasan dan memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973).

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973), sehingga dapat menjadi bekal penulis untuk mengajar kelak di kemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan berbagai sumber untuk menjawab perumusan masalah. Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari pada seseorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diaktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber primer hanya harus asli dalam artian, kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari tangan pertama. Sumber sekunder adalah kesaksian dari kesaksian orang lain yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.¹²

Beberapa sumber primer dari buku dan artikel surat kabar antara lain:

1. Buku :

Pertama, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi* seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H. Buku ini adalah sumber yang sangat penting karena isinya menguraikan tentang perjuangan dan karir politik-militer Soeharto sejak dari masa muda sampai menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua dan memangku jabatan itu hingga beberapa periode. Keberhasilan-keberhasilannya dalam memimpin bangsa Indonesia yang berjumlah 170 juta orang ini, telah mengharumkan nama rakyat dan bangsa Indonesia di mata internasional. Berbagai negara dan badan-badan dunia lainnya mengakui keberhasilan Soeharto dalam memimpin bangsa Indonesia.

¹² Louis Gottschalk, 1975: *Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto)*, Jakarta, UI Press, hlm. 32-35.

Kedua, *Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1967 di Depan Sidang DPR-GR*, karangan Soeharto. Beberapa bagian buku ini berisi pidato-pidato Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia yang kedua sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XLIX/1968, misalnya “keadaan sosial dan politik”, dan “keadaan sosial dan ekonomi” yang disampaikan dalam sidang DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1970.

Ketiga, *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)*, karangan Soeharto. Buku ini tentang pidato-pidato Soeharto mengenai pelaksanaan pembangunan lima tahun pada tahun 1969/1970 dengan tetap menjaga stabilitas moneter. Salah satu sumber terpenting bagi pelaksanaan pembangunan adalah tersedianya APBN.

Keempat, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, karangan Soeharto. Buku ini berisi tentang penghayatan Pancasila, baik secara Idiil maupun pengamalan seperti dalam pembangunan jangka panjang pertama, karena pembangunan adalah pengamalan Pancasila. Selain itu buku ini juga memuat tentang perbaikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan-pembangunan di segala bidang dan aspek kehidupan.

Kelima, *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Pemerintah Orde Baru*, karangan Soeharto. Buku ini berisi tentang pandangan dan gambaran tentang arti pembangunan bangsa bagi segenap masyarakat terutama bagi generasi muda. Selain itu buku ini juga memuat tentang

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan kebijakan pemerintahan Orde Baru sebagai penunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

2. Artikel :

Pertama, "Dari Kemusuk Sampai cendana", *Kedaulatan Rakyat* Senin 28 Januari 2008. Berisi tentang riwayat Soeharto dari masak kanak-kanak, perjalanan karir militernya sampai menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XLIV/1968 untuk masa jabatan pertama.

Kedua, "Modal Asing: Perspektif 1970-an", *Tempo 8 Mei 1971*. Berisi tentang pandangan tentang modal asing yang dapat membantu mengembangkan kemampuan teknologi industri-industri dan tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Ketiga, "Pembangunan Adalah Pekerjaan Rutin", *Tempo 12 Juni 1971*. Berisi tentang peranan teknokrat atau ahli-ahli ekonom dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi di Indonesia.

Keempat, "Transmigrasi Dari Sosial ke Ekonomi", *Tempo 4 Maret 1972*. Berisi tentang kebijakan Prof. Subroto sebagai menteri transmigrasi yang mengubah kebijakan sosial ke aspek ekonomi, hal ini dilakukan karena ingin membekali para transmigran agar dapat mengembangkan kekayaan alam yang ada di daerah yang ditempatinya, misalnya Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Beberapa sumber sekunder antara lain:

Pertama, *Mengenai Perjuangan Letkol Soeharto di Yogyakarta*, karangan A. Eryono. Buku ini tentang perjuangan Soeharto dalam mengusir penjajah yang

penuh resiko, jiwa, harta dan apa saja yang telah dipertaruhkan tanpa menghitung imbalan yang akan diterimanya, seperti a) Peristiwa 3 Juli 1946, b) Serangan Umum 1 Maret 1949 yang merupakan awal pengusiran tentara Belanda dalam perang kemerdekaan, c) Pembebasan Daerah Irian Barat (Irian Jaya), dan d) Pemberontakan Gerakan 30 September 1965 dan Supersemar.

Kedua, *Ekonomi Orde Baru*, karangan Anne Booth dan Peter McCawley. Buku ini membahas tentang kebijakan ekonomi Indonesia dimulai pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Buku ini menyajikan analisis dan catatan-catatan penting tentang kebijakan ekonomi Orde Baru terhadap kebijakan pangan, kebijakan sektor industri, kebijakan fiskal, dan kebijakan penanaman modal asing.

Ketiga, *Pangan Dalam Orde Baru*, karangan Bustanil Arifin. Buku ini membahas tentang pandangan peranan Bulog di Indonesia dan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam rangka mewujudkan swasembada beras.

Keempat, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*, karangan Leon A. Mears. Buku ini membahas tentang perubahan-perubahan situasi perberasan di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Buku ini penting digunakan karena di dalamnya dijelaskan mengenai strategi pembangunan pertanian di Indonesia.

Kelima, *Soeharto, Dari Prajurit Sampai Presiden*, karangan O.G. Roeder. Buku ini penting untuk digunakan karena di dalamnya diuraikan tentang latar belakang lahirnya pemerintahan Soeharto sampai ia diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua menggantikan Presiden Soekarno sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XLIX/1968 secara penuh. Selain itu buku ini juga menjelaskan tentang kehidupan masak kecil Soeharto sampai ia menjadi Presiden.

Keenam, *Pembangunan Pertanian*, karangan Soekartawi. Buku ini memuat tentang aspek pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Buku ini juga memuat kebijakan-kebijakan infrastruktur yang menunjang program intensifikasi.

Ketujuh, *Soeharto Suatu Sketsa Karir dan Politik*, karangan Suripto. Buku ini menyajikan analisis dan catatan-catatan penting tentang perjalanan karir militer Soeharto dari prajurit sampai ia menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua menggantikan Presiden Soekarno.

Kedelapan, *Jejak Langkah Pak Harto*, karangan Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia. Buku ini adalah sumber yang lengkap karena terdapat beberapa jilid. Buku ini penting digunakan karena di dalamnya dijelaskan tentang pandangan dan pikiran politik Soeharto dan pemerintahannya. Selain itu buku ini juga berisi tentang sikap dan kebijakan pemerintahan Soeharto dalam berbagai hal.

Kesembilan, *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, karangan Tjahyadi Nugroho. Buku ini membahas tentang peran Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang dimulai pada Repelita I hingga Repelita IV. Buku ini menyajikan catatan-catatan penting tentang keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.

Kesepuluh, *Bisnis Dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, karangan Yahya Muhaimin. Buku ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan ekonomi Indonesia periode 1950-1980, yang menyangkut strategi pembangunan Orde Baru untuk kepentingan politis yaitu upaya mempertahankan legitimasi kekuasaan, serta mengenai bagaimana Soeharto membentuk tim

ekonomi yang melibatkan orang sipil (teknokrat) dan militer. Buku ini juga memuat tentang kebijakan ekonomi Orde Baru terhadap modal asing dan utang luar negeri.

Kesebelas, *Perekonomian Indonesia*, karangan Zulkarnain Djamin. Buku ini membahas tentang pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Buku ini juga membahas perkembangan perekonomian Indonesia.

F. Kajian Teori

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973), penulis berusaha menguraikan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut antara lain: peranan, pembangunan ekonomi, Repelita. Tujuan dari penjabaran konsep adalah memperjelas arti dari beberapa kata penting yang sering kali digunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Peranan

Peranan berasal dari kata dasar peran yang artinya cara tertentu yang dilakukan seseorang untuk menjalankan peran yang dipilihnya.¹³ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah fungsi seseorang dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.¹⁵

Maksud peranan dalam penulisan ini mengacu pada peranan atau tugas yang harus

¹³ Save M. Dagun: *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Edisi Kedua, op. cit.*, hlm. 825.

¹⁴ Sri Sukei Adiwimarta, 1983: *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, hlm.1579.

¹⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, 1991: *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*, Jakarta, Modern English Press, hlm. 1133.

dilakukan oleh Soeharto dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua menggantikan Presiden Soekarno sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XLIV/1968. Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia mengemban tugas penting untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan nasional, maka Soeharto sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah pertumbuhan, perluasan ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus digali dan yang harus dibangun agar tercapai kemajuan di masa yang akan datang.¹⁶ Pembangunan juga berarti pembangunan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB atau GNP) dan dicapai dengan investasi besar-besaran dalam satu-dua sektor strategis, khususnya industri dan prasarana di sektor modern.¹⁷ Maka yang dimaksud pembangunan dalam penulisan ini mengacu pada aktivitas suatu bangsa untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang ada agar dicapai kemajuan dalam kehidupan masyarakat¹⁸ dan juga sebagai usaha terpadu di pelbagai sektor untuk mempersiapkan tahap “tinggal landas”.

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomikos, oikonomia dari oikos yang berarti rumah dan nemein yang berarti mengurus dan mengelola. Jadi

¹⁶ Hassan Shadily, 1984: *Ensiklopedi Indonesia, edisi kelima*, Jakarta, hlm. 2612.

¹⁷ T. Gilarso, 1986: *Ekonomi Indonesia, Sebuah Pengantar, Jilid 1*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 205.

¹⁸ Save M. Dagun, 1997: *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, hlm. 804.

Ekonomi berarti kegiatan langsung menyangkut produksi konsumsi, distribusi barang dan jasa dengan tujuan akhir adalah mensejahterakan masyarakat umum.¹⁹ Ekonomi juga berarti pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), pemakaian barang-barang dan kekayaan seperti, keuangan, perindustrian, dan perdagangan.²⁰ Jadi pembangunan ekonomi merupakan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi yang melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.²¹ Selama bangsa Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto memegang peranan yang penting sekali untuk mengatur, menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.²² Pembangunan ekonomi tidak boleh dilepaskan dari pembangunan manusia dan masyarakatnya.²³ Oleh sebab itu, maka pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjadi pelopor yang menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, khususnya di bidang-bidang prasarana produksi yang belum dikerjakan oleh usaha swasta. Untuk itu diadakan proyek-proyek pembangunan, seperti a) usaha modernisasi pertanian dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

²⁰ Wilfridus Josep Sabarija Poerwadarminta, 1976: *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta, PN Bali Pustaka, hlm. 267.

²¹ Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 29.

²² T. Gilarso, *op. cit.*, hlm. 164.

²³ *Ibid.*, hlm. 206.

industrialisasi, b) pembangunan jalan-jalan raya, c) fasilitas pasar, d) pengairan, e) penanggulangan banjir, f) wabah, hama dan bencana alam, dan g) penghijauan kembali.²⁴

Dengan demikian pembangunan ekonomi harus mampu membawa perubahan yang cukup fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, dari negara agraris yang mengutamakan pada sektor pertanian dan hanya sedikit menggunakan industri harus mengubah menjadi struktur ekonomi yang lebih seimbang, yakni di mana industri sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia yang didukung oleh pertanian yang kuat dan tangguh.

3. Repelita

Repelita berasal dari kata dasar pelita yang berarti pembangunan lima tahun. Jadi Repelita dapat diartikan sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun.²⁵ Selain itu Repelita juga berarti suatu ketetapan pembangunan lima tahun yang disusun pemerintah Republik Indonesia sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan²⁶ sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XLI/MPRS/1968, yang penyusunan dan pelaksanaannya menjadi salah satu tugas Kabinet Pembangunan.²⁷

Dalam Repelita 1 ini diarahkan pada pencapaian stabilisasi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan industri yang menunjang sektor pertanian²⁸ Ditematkannya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai strategi dasar dalam

²⁴ *Ibid.*, hlm. 166.

²⁵ Sjahrir et al, 1989: *Menuju Masyarakat Adil Makmur, 70 tahun Prof. Sarbini Sumawinata*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 140.

²⁶ Hassan Shadily, *op. cit.*, hlm. 2884.

²⁷ Soeharto: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, *op. cit.*, hlm. 375.

²⁸ Zulkarnain Djamin, *op. cit.*, hlm. 29.

Repelita 1 tersebut, didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk melaksanakan Repelita yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan atau diprioritaskan. Maka usaha untuk menciptakan landasan ekonomi yang memadai, yaitu dengan keadaan ekonomi yang stabil sebagai syarat yang penting bagi berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Adapun sasaran Repelita yang hendak dicapai sangatlah sederhana, yaitu: pangan, sandang, perluasan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rohani.²⁹ Dalam melaksanakan Repelita ini, sektor pertanian memberi sumbangan terbesar kepada penerimaan devisa dan lapangan pekerjaan.³⁰

Dengan majunya sektor pertanian, maka lain-lain sektor turut pula terangsang pembangunannya, antara lain sektor industri yang menunjang sektor pertanian seperti pabrik pupuk, insektisida, pestisida, dan bahan kimia lainnya akan ikut terangkat oleh peningkatan produksi pertanian, sehingga terbukalah kesempatan untuk memperluas produksi dari bahan-bahan ini. Kegiatan ini telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan antara lain, produksi beras telah meningkat dari 11,232 juta ton menjadi 14 juta ton dan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun.³¹ Maka pemerintah telah berhasil menyiapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1968-1973, yang akan menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tahun demi tahun.

²⁹ Soeharto: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, *op. cit.*, hlm. 379.

³⁰ Zulkarnain Djamin, *op. cit.*, hlm. 31.

³¹ *Ibid.*, hlm. 31.

Jadi hubungan antara peranan, pembangunan ekonomi, dan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) pada penulisan ini mengacu pada peranan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua yang mengemban tugas untuk membangun pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini Soeharto lebih memprioritaskan pada pembangunan ekonomi, karena ingin menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu maka pembangunan harus mampu membawa perubahan yang cukup fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, yang dari negara agraris yang dititikberatkan pada pertanian dan hanya menggunakan sedikit industri harus mengubah menjadi struktur ekonomi yang lebih seimbang, yakni di mana industri sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia yang didukung oleh pertanian yang kuat dan tangguh. Pembangunan ekonomi ini tidak terlepas dari rencana pembangunan lima tahun (Repelita), karena pembangunan ekonomi adalah sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.

G. Hipotesis

Dari uraian di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

1. Kalau Soeharto dilahirkan di kalangan rakyat miskin, maka Soeharto akan berusaha keras untuk maju dalam bidang sosial ekonomi.
2. Kalau kehidupan perekonomian di Indonesia mengalami keterpurukan, maka Soeharto akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi pada Repelita 1.
3. Kalau Soeharto berhasil mengumpulkan ahli-ahli ekonomi pembangunan yang ada di Indonesia, maka Repelita I akan berjalan lancar.

H. Metodologi Penelitian

1. Metodologi

Metodologi berasal dari kata dasar metode (*methodos*) yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya jalan ke sesuatu dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi metode dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan atau cara untuk memberitahukan pengetahuan.³² Selain itu metode juga berarti prosedur atau langkah-langkah kerja dalam rangka membuat analisis dan sintesis atas bahan yang dikaji.³³ Maka yang dimaksud metodologi adalah cara dan prosedur yang akan ditempuh peneliti untuk mencari pemecahan masalah.³⁴ Dalam mengkaji tentang Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973), digunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa langkah³⁵ Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah tersebut antara lain:

a) Pemilihan Topik

Topik yang dibahas kali ini adalah Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973), topik ini dipilih karena merupakan kajian sejarah tentang tokoh yang sangat berperan dalam kancah ekonomi Indonesia. Selain itu topik dipilih karena mempunyai batas waktu dari tahun 1968-1973, sehingga penulisan ini tidaklah terlalu luas pembahasannya dan jelas rentang waktunya.

Pada tahun itu juga bangsa Indonesia mengalami peristiwa-peristiwa penting salah satunya adalah Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia

³² Louis Gotschalk, *op. cit.*, hlm. 32.

³³ Program Studi Pendidikan Sejarah, 2003: *Buku Pedoman Program Pendidikan Sejarah*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, hlm. 38.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁵ Louis Gotschalk, *op. cit.*, hlm. 32.

yang kedua sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XLIV/1968 pada tanggal 27 Maret 1968³⁶ menggantikan Presiden Soekarno, Soeharto mampu memperbaiki ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulunya yakni Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Soeharto mampu meningkatkan produksi pangan (khususnya beras), mengurangi jumlah penduduk Indonesia dengan program keluarga berencana dan transmigrasi, dan kesejahteraan rohani.

b) Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah proses mengumpulkan informasi atau data untuk keperluan subyek yang diteliti.³⁷ Sumber-sumber yang dikumpulkan dan diseleksi dijadikan sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diteliti dan cara mendapatkan sumber dalam penulisan ini adalah studi pustaka, penulis mencari dan mengumpulkan buku-buku yang sesuai dan juga mendukung dengan topik yang diteliti. Pencarian buku-buku ini dilakukan di beberapa perpustakaan yaitu di perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Perpustakaan Pusat DIY, dan perpustakaan Kolose St. Ignatius, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah a) *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Otobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.*, b) *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)*, c) *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional*

³⁶ O.G. Roeder: *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden, op. cit.*, hlm. 205.

³⁷ Louis Gotschalk, *op. cit.*, hlm. 35.

Kedua, d) *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Pemerintah Orde Baru*, dan e) *Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1967 di Depan Sidang DPR-GR*. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah a) *Jejak langkah Pak Harto*, b) *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden*, c) *Mengenal Perjuangan Letkol Soeharto di Yogyakarta*, d) *Ekonomi Orde Baru*, e) *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, f) *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, g) *Pembangunan Pertanian*, h) *Pangan Dalam Orde Baru*, i) *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*, j) *Soeharto Suatu Sketsa Karir dan Politik*, dan k) *Perekonomian Indonesia*.

c) Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi adalah pengujian dari sumber-sumber sejarah. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat *otentisitas* (keaslian sumber) dan tingkat *kredibilitas* (kebisaan dipercaya) sumber.³⁸ Kritik sumber juga merupakan uji data pada penelitian sejarah yang terdiri dari kritik ektern dan kritik intern. Kritik ekstern dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai, jenis huruf yang digunakan dan jauh dekat dari peristiwa (membuktikan keasliannya). Sedangkan kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Penulis melakukan kritik sumber dengan cara melihat dan mengkaji apakah sumber tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan bersifat obyektif, sehingga diperoleh data-data yang dapat dipercaya dan relevan. Hasil dari kritik sumber adalah fakta-fakta yang merupakan unsur untuk melakukan rekonstruksi.

³⁸ Koentowijoyo, 1995: *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, hlm. 99-100.

d) Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang dilakukan apabila data telah terseleksi dan teruji kebenarannya. Dalam tahap ini dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data seteliti mungkin supaya hasil penulisan menjadi akurat. Oleh karena itu dilakukan pengolahan data secara cermat untuk mengurangi unsur subyektifitas. Meskipun demikian unsur tersebut akan selalu ada dalam setiap penulisan sejarah karena sejarah dalam arti obyektif yaitu diamati oleh subyek sebagai persepsi. Sudah barang tentu sebagai masukan tidak akan pernah tetap murni tetapi telah diberi warna sesuai dengan selera subyek.³⁹ Sejalan dengan hal itu, penulis akan berusaha untuk menyusun dan menganalisis data secermat mungkin mengingat penelitian ini merupakan pembahasan terhadap peristiwa yang sudah lama terjadi.

e) Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah yang tertuang dalam bentuk tulisan hasil penelitian sejarah. Historiografi juga merupakan suatu proses penulisan sejarah yang dimaksudkan menciptakan kembali totalitas dari fakta yang disusun kembali melalui proses untuk menemukan dan melaporkan kebenaran dari fakta yang ada. Dalam penulisan sejarah tidaklah sederhana sebab fakta-fakta sejarah harus diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi tekanan dan ditempatkan dalam suatu urutan kausal. Penulisan penelitian sejarah kali ini berjudul Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973). Metode penulisan

³⁹ Sartono Kartodirdjo, 1992: *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 62. Bandingkan dengan Louis Gottschalk (terjemahan Nugroho Notosusanto), *op. cit.*, hlm. 27-28.

yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu jenis penulisan yang menggambarkan kejadian dari masa lalu dan menguraikannya berdasarkan hubungan sebab akibat.⁴⁰

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan multidimensional, artinya pendekatan yang menggunakan berbagai jenis konsep, hipotesa dan teori sebagai kerangka refleksi yang dipakai untuk mencari dan mengatur data atau mengkaji masalah yang terjadi. Pendekatan psikologi⁴¹ digunakan untuk menganalisa latar belakang dari kehausan dan ambisi seseorang atau sekelompok orang akan kekuasaan, dalam hal ini adalah Soeharto dan pemerintahannya. Selain itu dari pendekatan tersebut dapat diketahui pula motif-motif dan hasrat Soeharto dan pemerintahannya yang selalu berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh Karena itu diharapkan, akan lebih memahami bagaimana karakter Soeharto dan pemerintahannya dalam menentukan pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita 1.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk memberikan gambaran tentang situasi perekonomian Indonesia pada tahun 1968-1973. Di mana pada masa itu Soeharto sangat berperan penting untuk melakukan perubahan ekonomi yang diwariskan dari pemerintah Orde Lama yang pada saat itu berada dalam keadaan yang kacau. Namun setapak demi setapak dengan keuletan, kesungguhan dan kerja keras, pemerintah dapat memperbaiki keadaan ekonomi dan segi-segi kehidupan lainnya. Dalam hal ini Soeharto ingin memenuhi kebutuhan hidup

⁴⁰ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 5-9.

⁴¹ Robert F. Berchover, Jr., 1969: *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, New York, The Free Press, hlm.40.

manusia, seperti pangan, sandang dan papan. Di mana Soeharto sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara yang bertugas untuk membangun manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pendekatan sosial digunakan untuk mengetahui kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Dalam hal ini mengenai hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk saling menyempurnakan, seperti desa dan keluarga. Hubungan ini semestinya sesuai dengan martabat manusia. Oleh karena itu Soeharto melakukan pemerataan dalam bidang kesejahteraan sosial untuk menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

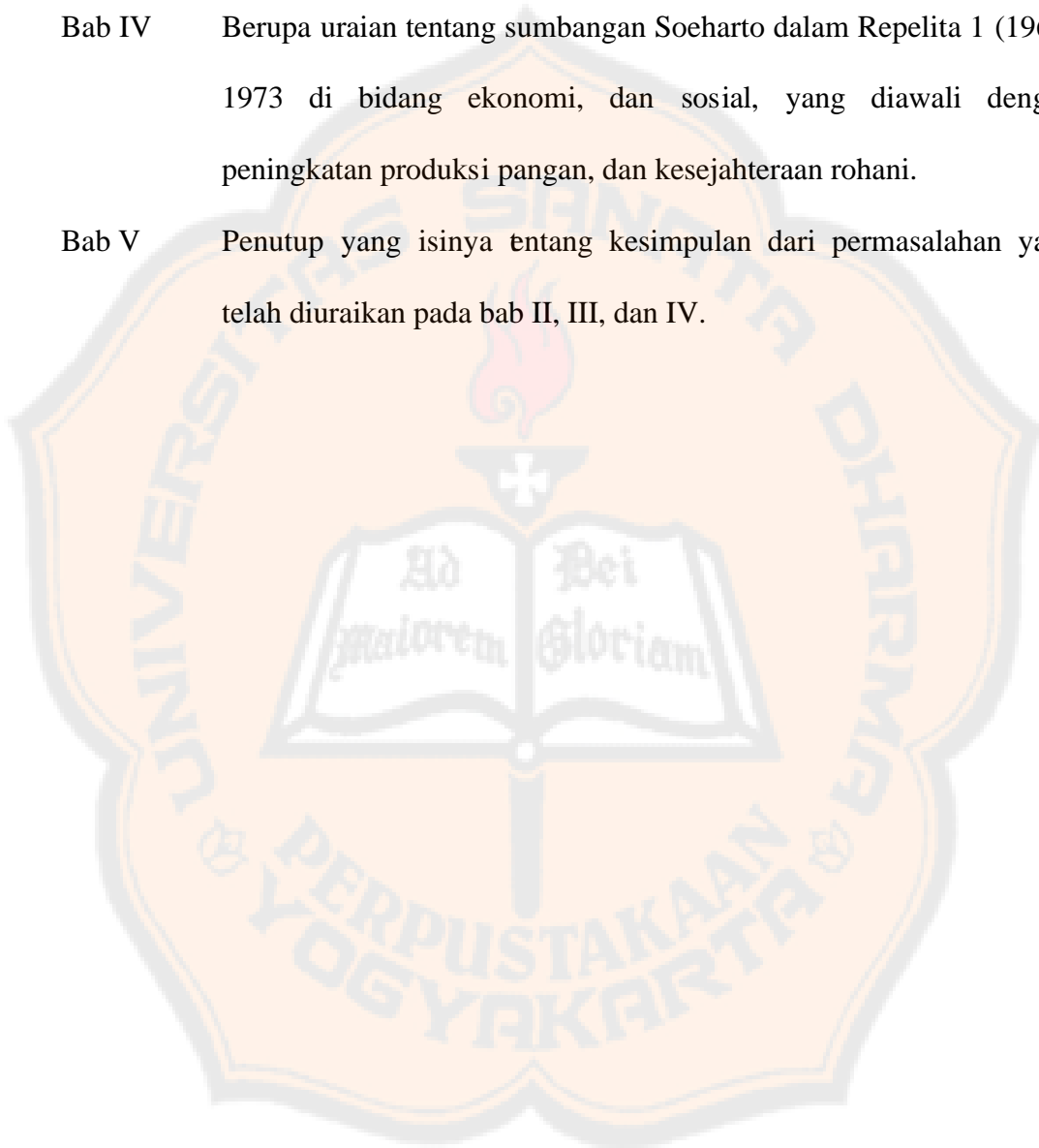
Skripsi yang berjudul “Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I 1968-1973” terdiri dari lima bab :

- Bab I Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Berupa uraian tentang latar belakang sosial ekonomi Soeharto, yang diawali dari latar belakang pendidikan dan latar belakang perjalanan karir militer Soeharto.
- Bab III Berupa uraian mengenai kebijakan Soeharto dalam Repelita 1 (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial, yang diawali dengan

bidang ekonomi: kebijakan pangan, kebijakan fiskal, dan penanaman modal asing. Kedua, di bidang sosial: kebijakan keluarga berencana, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Bab IV Berupa uraian tentang sumbangan Soeharto dalam Repelita 1 (1968-1973 di bidang ekonomi, dan sosial, yang diawali dengan peningkatan produksi pangan, dan kesejahteraan rohani.

Bab V Penutup yang isinya tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, dan IV.



BAB II

LATAR BELAKANG SOSIAL EKONOMI SOEHARTO

A. Latar Belakang Pendidikan

Soeharto dilahirkan pada tanggal 8 Juni 1921 di desa Kemusuk, Argamulya, Godean, Yogyakarta. Soeharto dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Sukirah dan ayahnya bernama Kertosudiro alias Kertorejo.⁴² Ayah Soeharto yang bernama Kertosudiro bekerja sebagai *ulu-ulu* yang ditugaskan untuk mengurus pembagian air. Kertosudiro sendiri tidak memiliki sebidang tanah pun, sawah yang dikerjakannya seluas kurang dari satu hektar yang di dapatnya dari pemerintah selama Kertosudiro menjabat sebagai *ulu-ulu*.⁴³ Menurut penduduk setempat pekerjaan *ulu-ulu* lebih ringan jika dibandingkan dengan pekerjaan mengolah sawah. Tetapi sebaliknya masyarakat desa itu memandang sebagai salah satu jabatan yang penting dengan tanggungjawab yang besar. Selain sebagai *ulu-ulu*, Kertosudiro juga memiliki tanggungjawab untuk merawat Soeharto.

Soeharto adalah anak ketiga dari istri kedua, yang sebelumnya Kertosudiro telah memiliki istri pertama dan mempunyai dua orang anak. Sebagai duda, Kertosudiro menikah lagi dengan Sukirah, setelah Kertosudiro bercerai dengan istri pertama. Tetapi hubungan dengan istri kedua (Sukirah) kurang serasi, hingga

⁴² Soeharto, 1989: *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi* seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., Jakarta, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, hlm. 6.

⁴³ *Ulu-ulu atau Jogotirto* adalah mengurus pembagian air dan perairan sawah dan juga sebagai salah satu dari pembantu lurah. Pembantu-pembantu lainnya adalah Carik atau juru tulis, Jogoboyo atau pengatur keamanan, Kamitua: pembantu kemakmuran dan Kebayan: pengatur sosial. Lihat O.G. Roeder, 1976: *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, Jakarta, PT. Gunung Agung, hlm. 130.

akhirnya mereka bercerai setelah Soeharto lahir.⁴⁴ Beberapa tahun kemudian Sukirah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Atmopawiro (ayah tiri Soeharto). Pernikahan ini melahirkan tujuh orang anak, sementara itu Kertosudiro pun menikah lagi dan mendapatkan empat orang anak lagi. Meskipun telah menikah lagi, namun Kertosudiro tidak melupakan pendidikan anaknya (Soeharto).

Soeharto memperoleh pendidikan melalui pendidikan formal dan mengenyam pendidikan sewaktu ia berumur delapan tahun, karena pada saat itu hanya anak-anak yang telah berumur dapat diterima masuk sekolah rakyat.⁴⁵ Soeharto disekolahkan pertama kali di desa Puluhan, Godean, yang kebetulan letaknya tidak jauh dari rumah Atmopawiro, di mana ayah dan ibunya tinggal.⁴⁶ Setelah ibu dan ayah tirinya pindah ke selatan (Kemusuk kidul), Soeharto pun turut pindah dan disekolahkan di Pedes. Sekolah di Pedes merupakan sekolah yang kedua baginya dan tidak lama setelah itu, ia terpaksa pindah ke rumah bibinya Prawirowihardjo di Wuryantoro, Surakarta, Jawa Tengah.

Sewaktu di Wuryantoro Soeharto dimasukkan lagi ke sekolah rakyat dan duduk di kelas tiga. Di sekolah ini, ia menekuni semua pelajaran, lebih-lebih pelajaran berhitung dan memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada di Kemusuk. Di samping itu ia juga memperoleh pendidikan agama yang cukup kuat, karena keluarga Prawirowihardjo terbilang tebal ketaatannya kepada agama.

⁴⁴ Soeharto: *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 6.

⁴⁵ Sekolah rakyat adalah anak kampung yang memasuki sekolah rendah dan menerima pelajaran dengan bahasa Jawa (sekarang SD). Lihat O.G. Roeder: *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto.*, *op. cit.*, hlm. 136.

⁴⁶ *Idem.*

Baru satu tahun berada di Wuryantoro, ia harus kembali ke Kemusuk, dan melanjutkan pendidikannya di sekolah Tiwir. Namun baru satu tahun berada di Kemusuk, ia harus kembali ke Wuryantoro untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah rakyat.

Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat selama empat tahun di Wuryantoro, tepatnya tahun 1934.⁴⁷ Ia kemudian melanjutkan ke sekolah lanjutan (*Vakschool*) di Wonogiri, Jawa Tengah bersama-sama dengan Sulardi. Soeharto tidak lama tinggal di Wonogiri, karena harus kembali ke Kemusuk untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah dan dapat menyelesaikannya pada tahun 1939.⁴⁸ Setelah menyelesaikan pendidikan di Schakel Muhammadiyah, ia melanjutkan ke sekolah militer (KNIL)⁴⁹ yang ada di Gombang, Jawa Tengah pada tanggal 1 Juni 1940. Selama enam bulan ia mendapat latihan dasar militer dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 Desember 1940. Ia juga mengikuti pendidikan ke Sekolah Kader di Gombang dan dinyatakan lulus.⁵⁰

Pendidikan yang diperoleh Soeharto tidak hanya itu, setelah lulus dari Sekolah Kader di Gombang, kemudian Soeharto melanjutkan pendidikannya di PETA⁵¹ yang baru dibuka oleh Jepang. Tujuan didirikan sekolah ini adalah untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan Sekutu, semua terdiri dari orang-orang Indonesia dengan perwira-perwira Indonesia dan dilatih oleh orang

⁴⁷ “Dari Kemusuk Sampai Cendana”, *Kedaulatan Rakyat* 28 Januari 2008, hlm. 24.

⁴⁸ O.G. Roeder: *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, *op. cit.*, hlm., 162-167.

⁴⁹ KNIL adalah singkatan dari Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Lihat G. Dwipayana dan Ramadhan K.h., *op. cit.*, hlm. 19.

⁵⁰ O.G. Roeder: *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, *op. cit.*, hlm. 171.

⁵¹ PETA adalah singkatan dari Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, *Ibid.*, hlm. 174.

Jepang. Kemudian Soeharto masuk Tentara Sukarela PETA dan ia memasuki lagi latihan militer, kali ini di sekolah militer Jepang dengan pelajaran bahasa, semangat dan kebudayaan Jepang. Setelah lulus dari PETA, Soeharto dikirim ke Bogor untuk melanjutkan pendidikan di sekolah latihan militer lanjutan (*Kyoikutai*).⁵² Dalam latihan ini yang diterima di *Kyoikutai* adalah lulusan sekolah rakyat sampai menengah tinggi (SMT). Di samping itu ada juga Kyai, guru-guru sekolah agama dan bekas pegawai kantor. Latihan militer lanjutan ini lamanya empat bulan dan Soeharto berhasil menyelesaikan latihannya di Sekolah Militer Tinggi di Bogor.

Selanjutnya pada tanggal 1 September 1957, Soeharto ditugaskan menjadi Anggota Dewan Kuraktor Akademi Nasional di Magelang, Yogyakarta. Sekolah perwira ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1945 dengan Mayor Jenderal Suwardi sebagai gubernur pertamanya, kemudian sekolah ini ditutup setelah Yogyakarta diserang oleh Belanda. Pada tahun 1957, Akademi ini dibuka kembali dan upacara pembukaannya dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Soeharto.⁵³

Pada tanggal 1 November 1959, Soeharto mendapatkan tugas dari Presiden Soekarno untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (SSKAD Sekarang menjadi SESKOAD) di Bandung.⁵⁴ Soeharto baru pertama kali memperoleh pendidikan staf militer yang tertinggi semenjak memasuki Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia juga pernah mengikuti latihan-latihan militer di zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang singkat, tetapi

⁵² *Idem.*

⁵³ O.G. Roeder, 1969: *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden*, Jakarta, PT. Gunung Agung, hlm. 166.

⁵⁴ O.G. Roeder: *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, *op. cit.*, hlm. 219-220.

pendidikan di sekolah militer di zaman kemerdekaan ini sangat banyak membantunya dan berpengaruh sangat besar baginya. Sebenarnya Soeharto harus masuk Akademi Militer terlebih dahulu tetapi berbagai tugas yang telah dijalankannya sebagai Komandan lapangan telah memungkinkannya untuk langsung mengikuti SESKOAD. Pendidikan yang diperoleh di SESKOAD berlangsung selama satu setengah tahun dan lulus dengan predikat terbaik. Di waktu itu Soeharto banyak mendapat teman-teman perwira yang kemudian menduduki pos-pos penting dalam angkatan darat.⁵⁵

B. Latar Belakang Perjalanan Karir Militer Soeharto

Soeharto mengawali karir militer sebagai prajurit di Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Pada waktu itu ia menjabat sebagai *Shodancho* (Komandan Peleton) yang ditugaskan di Yogyakarta, tepatnya tanggal 8 Oktober 1943.⁵⁶ Selama empat bulan, ia menjabat sebagai *Shodancho* yang kemudian diangkat menjadi *Chudancho* (Komandan Kompi) di tahun 1944⁵⁷ dan mendapat tugas untuk memimpin kesatuan PETA di Solo. Di Solo Soeharto bertemu dengan adiknya Sulardi yang bekerja di kantor pertanian kota. Pertemuan Soeharto dan Sulardi ini hanya sebentar, karena Soeharto harus dipindahkan ke Madiun, Jawa

⁵⁵ Sahabat Soeharto waktu di SESKOAD yaitu Kolonel A. Tahir, Kolonel Sutojo, Kolonel Askari, Kolonel Abdurachman, Kolonel Gani (semua bekas atase militer), dan juga perwira bekas Panglima ialah Kolonel Ruhman dan Brigjen Sarbini. Perwira Staf lainnya antara lain Kolonel Ir. Sudarto., Kolonel Munadi dan Kolonel Amir Machmud. Lihat *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi* seperti dipaparkan oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 94.

⁵⁶ O.G. Roeder: *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden, op. cit.*, hlm. 128-129.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

Timur, sebagai Perwira Staf di Markas PETA setempat yang bertugas sebagai pelatih.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu karir Soeharto sebagai *Chudancho* juga berakhir, karena markas besar Jepang membubarkan semua organisasi bersenjata di Indonesia. Dengan dibubarkannya organisasi tersebut, ia kembali ke kampungnya di Kemusuk, Yogyakarta. Di Yogyakarta Soeharto ikut membentuk pasukan bersenjata dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang dipimpin oleh Umar Slamet dan wakil Komandannya, yaitu Soeharto.⁵⁸ Anggota dari BKR ini terdiri dari bekas prajurit-prajurit PETA, organisasi-organisasi pemuda dan militer lainnya. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Soeharto mendapatkan tugas dari Umar Slamet untuk mempersenjatai sukarelawan-sukarelawan yang telah mendaftarkan diri ke BKR. Para sukarelawan-sukarelawan tersebut, sebagian besar berasal dari bekas PETA dan pemuda-pemuda yang belum pernah mengalami latihan militer.⁵⁹

Ketika Komandan Umar Slamet harus meninggalkan Yogyakarta menuju Madiun untuk beberapa waktu. Soeharto mengambil keputusan untuk melakukan penyerbuan terhadap asrama milik Jepang yang ada di Kota Baru, tepatnya tahun 1945.⁶⁰ Dalam penyerbuan tersebut, tentara Jepang menyerah dan Soeharto beserta anak buahnya berhasil membawa beratus-ratus senjata ringan dan

⁵⁸ Badan Keamanan Rakyat didirikan pada tanggal 22 Agustus 1945. Jenderal Sudirman ditetapkan sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember 1945 (terpilih pada tanggal 12 November 1945). Tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat dirubah menjadi Tentara Keselamatan rakyat (TKR). Tanggal 25 Januari 1946 mengalami perubahan lagi dengan nama Tentara Republik Indonesia (TRI) dan pada tanggal 5 Mei 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Ibid.*, hlm. 132.

⁵⁹ *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi* seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 28.

⁶⁰ Suropto, 1972: *Soeharto, Suatu Sketsa Karier Dan Politik*, Surabaya, GRIP, hlm. 36.

beberapa senjata berat. Nama Soeharto dikenal di daerah Yogyakarta ketika ia menjabat sebagai wakil Komandan BKR, dalam penyerbuan asrama milik Jepang yang ada di Kota Baru. Keberhasilan tersebut membuat karir Soeharto sebagai tentara Republik Indonesia gemilang. Pada bulan Oktober 1945 menjabat sebagai Komandan Batalyon 10/Divisi IX dengan pangkat Mayor. Kesatuan ini terdiri dari pejuang-pejuang yang telah turut dalam pertempuran di Kota Baru pada tahun 1945⁶¹ yang mempunyai jiwa kesatuan yang kokoh.

Dengan masuknya tentara Sekutu ke Indonesia, khususnya di Jawa ikut serta tentara Belanda (NICA) di dalamnya pada tanggal 29 September 1945.⁶² Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun maksud kedatangan mereka diketahui oleh tentara Indonesia, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara Sekutu. Perlawanan tentara Indonesia terhadap Sekutu membuat Soeharto sebagai Komandan Batalyon 10/Divisi IX ikut menyerbu Magelang dan mampu memukul mundur tentara Sekutu ke Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah yang kemudian dikenal dengan nama "Palagan Ambarawa."⁶³

Pada waktu itu Soeharto mendapat perhatian Jenderal Soedirman,⁶⁴ karena ia mampu memukul mundur tentara Sekutu dari Magelang sampai ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam mengadakan reorganisasi dan penyempurnaan tubuh TKR,

⁶¹ O.G. Roeder: *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, *op. cit.*, hlm. 181.

⁶² G. Moedjanto, M.A., 1988: *Indonesia Abad Ke- 20, Jilid I Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 96.

⁶³ *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi* seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 31-33.

⁶⁴ Tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal dan Urip Sumohardjo sebagai Kepala Staf dengan tetap berpangkat Letnan Jenderal. *Ibid.*, hlm. 34.

Jenderal Soedirman mengangkat Soeharto menjadi Komandan Resimen III dengan pangkat Letnan Kolonel yang menguasai daerah Yogyakarta, dengan wakil Komandannya Mayor Rekso. Dalam tugasnya ia membawahkan empat Batalyon yakni Batalyon 8 di bawah Mayor Sardjono, Batalyon 10 di bawah Mayor J. Sudjono, Batalyon 19 di bawah Mayor Sumiarsono, dan Batalyon 25 di bawah Mayor Mohammad Basyuni.⁶⁵

Selanjutnya Soeharto menerima perintah untuk mempersiapkan satu Staf Brigade mobil dan dua Batalyon penggempur. Kedua Batalyon penggempur yang disiapkan adalah Batalyon Kresno di bawah pimpinan Rekso dan Batalyon Seno di bawah Mayor Sudjono. Kolonel A.E Kawilarang disertai Kolonel Gatot Soebroto memeriksa Batalyon Kresno dan Batalyon Seno. Pada waktu itu Panglima Divisi Jawa Tengah, Kolonel Gatot Soebroto diperintahkan untuk membentuk satu-satuan tugas untuk menghancurkan Andi Aziz dan Kolonel Gatot Soebroto membutuhkan seorang perwira dalam menjalankan perintah itu. Maka dipilihlah Soeharto sebagai Komandan Brigade Garuda Mataram yang mendampingi Kolonel Gatot Soebroto dalam melawan Pemberontakan Andi Azis yang ada di Makasar, Sulawesi Selatan. Dalam pemberontakan tersebut, Soeharto mampu menghancurkan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Azis.

Setelah selesai menjalankan tugasnya di Sulawesi Selatan, Soeharto ditarik kembali ke Yogyakarta sebagai Brigade Pragola berpangkat Komandan dan berkedudukan di Salatiga, Jawa Tengah, tepatnya bulan November 1951.⁶⁶ Sebagai Komandan Brigade Pragola, ia mengalami pemberontakan Batalyon 46

⁶⁵ *Idem.*

⁶⁶ Suropto, *op. cit.*, hlm. 55.

yang di pimpin oleh Kertosoewiryo. Namun pemberontakan tersebut dapat dihancurkan oleh Soeharto. Pada 1952, Soeharto dipindahkan ke Markas Divisi di Solo dan berpangkat Komandan Resimen Infantri 15.⁶⁷

Di permulaan tahun 1956, Soeharto dipindahkan ke Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) sebagai Asisten Kepala Staf Angkatan Darat berpangkat Kepala Staf Territorium IV (Divisi Diponegoro) yang berkedudukan di Semarang. Ia bertugas sebagai Kepala Staf selama tiga bulan, karena pada tanggal 3 Juni 1956 jabatannya dinaikkan menjadi Panglima TT-IV/Diponegoro yang kemudian menjadi Kodam Diponegoro, menggantikan Kolonel M. Bachrum.⁶⁸ Selama menjabat sebagai Panglima TT-IV/Diponegoro, sebagai penguasa perang di Jawa Tengah Soeharto melihat situasi rakyat Jawa Tengah menderita, karena kekurangan makan yang disebabkan oleh gagal panen. Untuk mengatasi kelaparan rakyat pada waktu itu, maka Soeharto memerintahkan Bob Hasan untuk melakukan barter dengan Singapura. Barter tersebut berupa gula yang ditukar dengan beras. Dengan tindakan yang dilakukan Soeharto untuk melakukan barter dengan Singapura, ternyata membawa masalah bagi dirinya sendiri karena ia diduga korupsi yang kemudian membawa Soeharto meninggalkan Kodam Diponegoro untuk menjalani pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) atas rekomendasi Mayor Jenderal Gatot Subroto dan Presiden Soekarno.⁶⁹

⁶⁷ O.G. Roeder: *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, *op. cit.*, hlm. 214.

⁶⁸ *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 89.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

Sekembalinya dari Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD), Soeharto mendapat tugas dari pemerintah untuk memimpin Deputy I Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan merangkap sebagai Ketua Angkatan Darat Hoc Retooling DEPAD.⁷⁰ Pada tahun 1961, Soeharto mendapat tugas untuk menyertai KASAD Jenderal A.H. Nasution melakukan dinas keluar negeri untuk melakukan inspeksi pada atase-atase militer di Yugoslavia, Perancis, dan Jerman Barat, dan itu merupakan perjalanan Soeharto ke Eropa untuk pertama kalinya.

Sepulangnya dari Eropa, Soeharto mendapatkan tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin operasi Pembebasan Irian Barat dengan pangkat Mayor Jenderal TNI semenjak 1 Januari 1962. Ia juga menjabat sebagai Panglima Komandan Antar Daerah Indonesia Timur merangkap Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, sejak surat tugas dari Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1962⁷¹ dan wakil panglimanya adalah Kolonel Laksamana Sudomo dan Kolonel Leo Watimena dan Kepala Stafnya adalah Kolonel Infateri A. Tahir. Markas Besar Komando Mandalanya didirikan di Makasar (Sulawesi Selatan)

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

⁷¹ Irian Barat merupakan peninggalan perjuangan anti-kolonial di tahun pertama Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 telah memutuskan “bahwa dalam tempo setahun setelah penyerahan kedaulatan (dari bekas Hindia Belanda) kepada Republik Indonesia Serikat, status politik Irian Barat diselesaikan melalui perundingan antara Jakarta (Indonesia) dan Den Haag (Belanda). Pemerintah Indonesia yang telah kecewa dengan kegagalan dari pemecahan masalah ini melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dengan keras menentang dibentuknya negara Papua di Irian Barat yang telah disponsori oleh Belanda sebagai satu pelanggaran terhadap semangat dan materi yang telah dicapai dalam KMB. Mula-mula Presiden Soekarno melaksanakan tekanan ekonomi terhadap Belanda, kemudian Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dan memulai dengan kampanye Trikora (Tri Komando Rakyat), pada tanggal 19 Desember 1961 untuk membebaskan Irian Barat dengan jalan kekerasan dan isi Trikora adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda, mengibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum. *Ibid.*, hlm. 103-104.

yang dalam enam bulan harus dapat mengkoordinasikan keempat cabang angkatan bersenjata yaitu darat, udara, laut dan kepolisian.⁷²

Dalam pembebasan Irian Barat, Soeharto merencanakan operasi yang dibagi dalam tingkatan permulaan dan lanjutan yang kemudian menyusun operasi gabungan yang akan diselundupkan ke Irian Barat untuk mengikat kesatuan-kesatuan musuh di daerah-daerah tertentu. Serangan terhadap daerah Biak pun dilakukan dengan Operasi Amphibi dengan kode Jayawijaya. Dalam hal ini Soeharto menyatakan:⁷³

“Bahwa ini adalah operasi terbesar yang pernah dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selain itu, operasi ini dianggap sangat berbahaya, mengingat kekuatan pasukan pihak Indonesia yang terbatas, termasuk dukungan udara yang diperlukan dalam serangan. Saya mengharapkan dapat mengalahkan musuh dalam tempo seminggu sesudah pendaratan, sesuai dengan rencana dan saya yakin bahwa musuh mempunyai kekuatan yang terbatas” perkataan Soeharto setelah mengengang-gekan kembali kejadian itu”.

Kemudian Soeharto mendapatkan perintah dari Presiden Soekarno untuk menunda operasi itu, karena perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda berhasil dan Belanda menyerah melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Pada tanggal 16 Agustus 1962, tercapai “*Persetujuan New York*” tentang penyerahan Irian Barat kepada NKRI. Salah satu pokok Persetujuan tersebut yakni bahwa bendera Republik Indonesia mulai berkibar bersamaan dengan bendera PBB, tepatnya tanggal 31 Desember 1962 dan pemulangan pegawai Belanda,

⁷² Kemampuan Belanda untuk mengadakan pukulan pada jarak ribuan km dari basisnya telah dibuktikan dengan pertempuran di laut Arafura. Kapal meriam Indonesia Macan Tutul telah ditenggelamkan oleh kekuatan Belanda yang lebih besar. Angkatan Laut Indonesia menyalahkan Angkatan Udara yang tidak memberikan perlindungan udara. Laksamana Udara Suryadarma, yang sekalipun mempunyai nama baik di bidang politik sebagai “Perwira yang progressif revolusioner”, telah dijadikan kambing hitam dan diberhentikan dengan tidak hormat. Suryadarma kemudian digantikan oleh Omar Dhani yang turut aktif dalam affair 30 September 1965. Lihat O.G. Roeder: *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden, op. cit.*, hlm. 169.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 170.

sipil, dan militer harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963.⁷⁴ Dalam penyerahan kekuasaan itu, bangsa Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno berhasil memasukkan Irian Barat (Irian Jaya) ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, Irian Barat (Irian Jaya) termasuk propinsi yang termuda waktu itu selain Timor-timur.

Setelah menyelesaikan tugas di Irian Barat, Soeharto kembali ke Jakarta dan pangkatnya dinaikkan menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada tanggal 1 Mei 1963.⁷⁵ Korps ini terdiri dari pasukan-pasukan siap tempur dari berbagai kesatuan yang meliputi satuan-satuan udara, Infantri, unit-unit lapis baja dan artileri. Kesatuan ini dimaksudkan untuk setiap waktu dapat bertindak terhadap musuh-musuh bangsa Indonesia. Selain itu pada tanggal 3 Mei 1964, Soeharto mendapatkan tugas dari presiden Soekarno untuk mempersiapkan pendaratan pasukan di Semenanjung Malaya dalam pengganyangan Malaysia yang terkenal dengan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).⁷⁶ Dalam pembentukan komando itu Omar Dhani dipilih sebagai Panglimanya.⁷⁷

Ketika Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia, di Indonesia sendiri sedang meletus Gerakan 30 September 1965 di Jakarta.⁷⁸ Dalam peristiwa itu Soeharto mempunyai peranan sangat penting, karena pada tanggal 1 Oktober 1965, ia harus memegang Pimpinan Sementara Angkatan Darat Republik

⁷⁴ Soeharto: *Pikiran, Ucapan, Dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 109.

⁷⁵ Malvin Calvin Ricklefs, 2001: *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Pustaka Yayasan Adikarya Ikapi, hlm. 540.

⁷⁶ Soeharto: *Pikiran, Ucapan, Dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 114.

⁷⁷ Omar Dhani yang dalam riwayat hidupnya merupakan seorang pemberontak Gerakan 30 September. *Idem*.

⁷⁸ P.J. Suwarno, 2004: *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Supersemar)*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, hlm. 61.

Indonesia dalam menghadapi gerakan kontra revolusi Gerakan 30 September.⁷⁹ Pada tanggal 2 Oktober 1965, Soeharto mendapatkan tugas dari Presiden Soekarno untuk menjadi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamptib).⁸⁰

Selang beberapa hari kemudian Soeharto diangkat menjadi Menteri atau Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 16 Oktober 1965.⁸¹ Sementara itu reaksi masyarakat Indonesia terhadap Gerakan 30 September muncul secara spontan dan mereka sudah membakar gedung PKI yang ada di Kramat. Dalam penumpasan PKI tersebut muncul berbagai kesatuan-kesatuan aksi seperti kesatuan aksi mahasiswa Indonesia (KAMI), aksi pemuda pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan aksi wanita Indonesia dan kesatuan aksi sarjana Indonesia. Pada saat itu Soeharto harus pegang kendali di tengah jalannya semua gerakan dari mahasiswa.

Pada tanggal 11 Oktober 1965, Soeharto mendapat kabar mengenai tertangkapnya Untung yang kemudian disusul oleh Aidit yang lari dari Halim ke Yogyakarta dengan naik pesawat AURI. Dengan pelariannya ke Yogyakarta Aidit tertangkap oleh Yon G dalam satu operasi yang dipimpin langsung oleh Kolonel Jasir Hadibroto (Komandan Brigif-4). Pada tanggal 22 November 1965, Aidit mati tertembak sewaktu akan melarikan diri sedangkan Untung diajukan ke sidang pengadilan dan dijatuhi hukuman mati.

Soeharto kemudian mengeluarkan instruksi yang berisi dasar-dasar kebijaksanaan, penertiban dan pembersihan personil sipil dari Gerakan 30

⁷⁹ Soeharto: *Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm.119.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

⁸¹ O.G. Roeder: *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden, op. cit.*, hlm. 252.

September di departemen-departemen dan lembaga-lembaga serta badan-badan lainnya dalam aparaturnya pemerintahan.⁸² Tindakan yang dilakukan oleh Soeharto dalam penumpasan Gerakan 30 September dan sisa-sisanya tidak berarti selesai, sebab selang beberapa waktu muncul lagi gerpol-gerpol (gerilya politik).

Di tengah suasana itu Kabinet Dwikora membuat langkah yaitu menaikkan harga BBM yang menyebabkan harga karcis bus dan kendaraan umum lainnya naik. Dengan kenaikan tarif bus itu, menyebabkan para mahasiswa tidak tahan. Maka para mahasiswa berkumpul di gedung Fakultas Kedokteran di Salemba. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu mempunyai maksud tertentu yaitu sebagai usaha untuk mengalihkan perhatian rakyat dari penganyangan Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) atau PKI ke soal kenaikan harga BBM.

Para mahasiswa yang aktif menentang kebijakan pemerintah waktu itu dan menuntut supaya Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) dikumandangkan yang isinya mengenai pembubaran PKI, bersihkan kabinet dari semua anasir-anasir pro komunis atau yang tidak kompeten, dan turunkan harga.⁸³ Dengan adanya tuntutan mahasiswa itu, maka Presiden Soekarno menerima delegasi KAMI dan menjelaskan kepada mereka betapa parahnya situasi ekonomi di Indonesia. Presiden Soekarno juga mengemukakan bahwa ia memahami tuntutan para mahasiswa itu dan akhirnya menyatakan bersedia menurunkan harga minyak serta akan mencari jalan untuk menurunkan harga barang secara keseluruhan.

⁸² Soeharto: *Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 140.

⁸³ P.J. Suwarno: *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Supersemar)*, *op. cit.*, hlm. 96.

Sementara itu pangkat Soeharto dinaikkan menjadi Letnan Jenderal TNI pada tanggal 1 Februari 1966.⁸⁴

Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengganti kabinet menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan Soeharto ditunjuk sebagai Menteri atau Panglima Angkatan darat merangkap Kepala Staf Komando Tertinggi dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan menggantikan Jenderal Nasution.⁸⁵ Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1966, Mayjen Soeharto mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk melaksanakan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang isinya:⁸⁶

“Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Pemimpin Besar Revolusi atau Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan dan memerintahkan kepada Soeharto untuk atas namanya mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, agar terjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Dua butir lagi ada di bawahnya, yakni Soeharto harus mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima angkatan lainnya dengan sebaik-baiknya, dan supaya Soeharto melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan tugas dan tanggung jawab Soeharto itu”.

Dengan adanya Supersemar, Soeharto mengambil keputusan untuk membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 berdasarkan wewenang yang ada pada surat tersebut.

Selang beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 27 Maret 1966, Presiden Soekarno mengumumkan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi, terdiri atas Presidium Kabinet dengan enam Waperdam. Soeharto diangkat menjadi Wakil

⁸⁴ *Soeharto: Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 162.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 163.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.171-172.

Perdana Menteri ad Interim bidang Pertahanan dan Keamanan (Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi) dan merangkap sebagai Menteri Hankam atau Panglima Angkatan Darat bersama dengan Dr. Leimena, Idham Chalid, Dr. Roeslan Abdulgani, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik⁸⁷ sedangkan Jenderal Nasution yang tidak duduk dalam Kabinet sudah dicalonkan menjadi Ketua MPRS. Pada bulan Juni 1966 baru dilaksanakan Sidang Umum IV MPRS yang memilih Jenderal Nasution sebagai Ketua MPRS dan menetapkan pengukuhan atas “Supersemar”. Dengan ini, Soeharto mendapat mandat dari MPRS untuk menjalankan segala sesuatu yang berkenaan dengan Supersemar.

Mandat yang diberikan MPRS kepada Soeharto mempermudah untuk bertindak. Di samping itu sidang MPRS ini mensahkan pembubaran PKI, memutuskan dan melarang Marxisme-Leninisme, Komunisme di atas bumi Indonesia ini dan mengusulkan dibentuknya sebuah panitia peneliti tentang ajaran Pemimpin Besar Revolusi, MPRS juga membubarkan “Kabinet Dwikora” yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Soeharto diminta untuk membentuk satu Kabinet baru. Sementara itu pangkat Soeharto sudah dinaikkan menjadi Jenderal TNI pada tanggal 1 Juni 1966,⁸⁸ kemudian Soeharto ditugaskan oleh MPRS (Ketetapan No.XIII/1966) membentuk Kabinet Ampera bersama dengan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1966.⁸⁹

Dalam pembentukan “Kabinet Ampera” ini yang mau tidak mau masih menunjukkan kompromi antara pikiran lama dan pikiran baru. Beberapa tokoh yang dianggap dekat dengan Presiden Soekarno masih masuk dalam Kabinet ini

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 176-179.

⁸⁹ O.G. Roeder: *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden*, *op. cit.*, hlm. 252.

dan Soeharto ditetapkan sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera atau Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam), tepatnya tanggal 25 juli 1966.⁹⁰ Kemudian Soeharto didesak oleh beberapa Kolega-kolega, Jenderal-jenderal, tokoh-tokoh politik dan ABRI untuk memimpin negara menggantikan presiden Soekarno tetapi Soeharto menolaknya dan mengatakan: “Saya tidak mempunyai keinginan untuk menjadi Presiden. Saya pun mengenal dengan baik diri saya. Menurut saya waktu itu, saya tidak mempunyai kemampuan untuk menduduki kursi yang lebih tinggi” perkataan Soeharto setelah mengengang- engang kembali kejadian itu”.⁹¹ Soeharto terus-menerus didesak untuk memimpin negara dan ia memenuhi desakan itu dan pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden selama satu tahun sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XXXIII/1967, yang berlaku mulai tanggal 22 Februari 1967 dan pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/1968.⁹²

⁹⁰ Soeharto: *Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op. cit.*, hlm. 179.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 188.

⁹² O.G. Roeder: *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden*, *op. cit.*, hlm. 252.

BAB III

KEBIJAKAN SOEHARTO DALAM REPELITA I (1963-1973)

DI BIDANG EKONOMI, DAN SOSIAL

Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto juga sering disebut Orde Pembangunan. Pembangunan ekonomi tersebut sebagai inti dari perwujudan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi artinya pemerintah menjalankan pembangunan ekonomi berlandaskan jiwa dan semangat pembukaan UUD dan batang tubuhnya.⁹³ Dalam hal ini kemakmuran masyarakatlah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang seorang, oleh sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Adapun arah dalam pembangunan tersebut yaitu untuk mensejahterakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan dapat mewujudkan percepatan modernisasi dalam mengejar keterlambatan di bidang teknologi dan ekonomi. Untuk itu Soeharto melaksanakan beberapa kebijakan di berbagai bidang yaitu :

A. Bidang Ekonomi

1. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan pada awal masa Orde Baru memberi tekanan pada bidang produksi dan konsumsi beras. Pada waktu itu kebijakan beras identik dengan kebijakan pangan.⁹⁴ Dalam melaksanakan kebijakan ini, pemerintah menitikberatkan pada bidang pertanian, karena pertanian merupakan sektor yang

⁹³ Soeharto: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, op. cit., hlm. 257.

⁹⁴ Anne Booth dan Peter McCawley: *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta, PT. Djaya Pirusa, hlm. 29.

sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Salah satu tujuan dari pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan.⁹⁵ Oleh sebab itu penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat secara adil dan merata. Di samping itu produksi pangan diusahakan ada peningkatan, sehingga pada akhir Repelita I Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras dari negara-negara lain, tetapi pada kenyataannya pemerintah Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 610.000 ton dengan nilai lebih dari 90 juta dolar Amerika, tepatnya pada tahun 1969.⁹⁶

Hal ini disebabkan karena panen musim kemarau tidak sebaik apa yang diharapkan sedangkan produksi jagung menurun dari 3,2 juta ton pada tahun 1968 menjadi 2,3 juta ton pada tahun 1969. Semua ini mengakibatkan harga-harga beras meningkat dengan cepat sekali pada bulan Juni 1969 dan bulan Januari 1970 tampak lonjakan ke atas.⁹⁷ Dengan demikian, maka pemerintah melaksanakan injeksi beras di pasaran dan dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Setelah injeksi beras dilaksanakan, harga-harga beras mulai tenang kembali terutama untuk jenis dan mutu beras yang diinjeksikan.

Tindakan-tindakan tersebut didasarkan pada kebijakan pangan, seperti yang telah diketahui bahwa kebijakan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam program stabilisasi ekonomi dan program peningkatan produksi pangan.

⁹⁵ Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, 1984: *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I-Pelita II-Pelita III*, *op. cit.*, hlm. 6.

⁹⁶ Soeharto: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April s/d 31 Maret 1970)*, *op. cit.*, hlm. 110.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 101-103. Secara lengkap lihat lampiran grafik perkembangan harga beras dan tabel harga beras bulanan di beberapa kota terpenting tahun 1968-1970, hlm. 87-89.

Kebijakan pangan ini ditujukan untuk mempertahankan harga-harga pangan yang sesuai pada taraf desa dan untuk mengamankan agar harga-harga beras pada taraf konsumen tidak meningkat tanpa batas. Di samping itu pemerintah juga menentukan harga minimum sebesar Rp 13.20,-/Kg untuk padi kering lumbung pada taraf desa dan harga maksimum sebesar Rp 50,-/Kg untuk bermutu sedang.⁹⁸

Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, kemudian menciptakan rumus tani⁹⁹ yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kebijakan harga. Kebijakan ini merupakan tindakan awal penerapan harga dasar beras. Dalam hal ini Soeharto mengatakan: “Bahwa harga-harga sembilan bahan pokok terutama beras masih harus dikendalikan, karena dalam perekonomian Indonesia dewasa ini, harga beras masih merupakan faktor penentu terhadap harga-harga barang lainnya”.¹⁰⁰ Namun dalam pelaksanaannya program rumus tani merupakan konsep yang terlalu kabur untuk dilaksanakan, karena ada perbedaan tentang harga beras menurut tempat dan waktu, masalah perbedaan antar daerah dan antar musim, dan juga terdapat ketidakpastian mengenai kepastian harga yang dimaksud yaitu beras atau padi.

Dengan kegagalan program tersebut, maka pemerintah melaksanakan program-program raksasa, seperti Bimas (Bimbingan masal) dan Inmas (Intensifikasi masal) yang diarahkan pada swasembada pangan. Namun dalam pelaksanaannya program Bimas dan Inmas mengalami kesulitan di bidang kredit

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

⁹⁹ Rumus tani merupakan harga satu kilogram beras sama dengan harga satu kilogram pupuk. Lihat Anne Booth dan Peter McCawley, *op. cit.*, hlm. 40.

¹⁰⁰ Team Dokumentasi Presiden Indonesia, seperti dipaparkan oleh G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin: *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1969-23 Maret 1973*, *op. cit.*, hlm. 90.

dan distribusi pupuk. Dengan adanya kesulitan tersebut, maka pemerintah mulai merencanakan untuk melaksanakan program Bimas Gotong Royong.¹⁰¹

Program Bimas Gotong Royong ini mengikutsertakan satu juta petani dengan luas areal 300.000 hektar yang terletak di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Program ini kemudian diperluas dalam musim-musim berikutnya, yang luas arealnya 550.000 hektar pada musim kemarau, tepatnya tahun 1969 dan 1.085.000 hektar pada musim hujan, tepatnya tahun 1969/1970.¹⁰² Dalam program Bimas Gotong Royong ternyata kurang memenuhi harapan, karena program Bimas Gotong Royong mengalami ketidaklancaran mekanisme pembayaran kembali kepada para petani dalam bentuk gabah dan salah satu konsekuensi keuangannya adalah kredit bank dalam jumlah yang besar harus disediakan buat Bulog¹⁰³ untuk membayar pada kontraktor asing.

Meskipun memiliki berbagai kelemahan, program Bimas Gotong Royong terbukti cukup efektif menyebarkan teknologi baru yang dilandasi penggunaan bibit unggul dan pupuk. Seperti yang telah diketahui bahwa bibit unggul merupakan sarana produksi terpenting untuk meningkatkan produksi beras. Semakin meluasnya penggunaan bibit unggul dan pupuk dan juga didukung oleh musim hujan yang baik, maka produksi beras menunjukkan kenaikan pesat pada

¹⁰¹ Bimas Gotong Royong (bimbingan masal gotong royong) merupakan usaha menuju suatu program penyuluhan besar-besaran disertai penyediaan pupuk dan kredit. Lihat Anne Booth dan Peter McCawley, *op. cit.*, hlm. 40.

¹⁰² *Idem.* Lihat juga Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970, *op. cit.*, hlm. 117.

¹⁰³ Bulog singkatan dari Badan Urusan Logistik. Bulog merupakan sebuah badan yang mengelola persediaan pangan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan ini kemudian tumbuh menjadi salah satu lembaga ekonomi terpenting di Indonesia. Lihat Anne Booth dan Peter McCawley, *op. cit.*, hlm. 36.

tahun 1969.¹⁰⁴ Hal ini disebabkan karena para petani menerima jenis PB yang memiliki keunggulan yang lebih menyolok, jika dibandingkan dengan varietes-varietes lain.

Dalam hal ini pemerintah berhasil dalam usaha-usaha penyuluhannya di bidang penyebaran bibit. Bahkan selama awal tahun 1969 harga-harga menunjukkan penurunan, karena operasi Bulog lebih ditekankan pada dikumpulkannya pembayaran kembali petani kepada pemerintah dalam bentuk *in natura* dan tidak lagi pada aspek moneter dari program pembelian dalam negeri. Dengan demikian, maka kepercayaan para petani semakin tinggi terhadap kemampuan Bulog dalam mengendalikan harga-harga eceran melalui sistem injeksi ke pasar bebas. Dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan patokan harga minimum gabah dan beras selama musim panen, tepatnya tahun 1970.

Pada tahun 1970/1971, dengan stok yang tidak besar, Bulog telah berhasil melaksanakan kebijakan harga baru dan Bulog telah berhasil mempertahankan harga minimum bagi petani dengan jalan menekankan perwakilan-perwakilan Bulog di daerah. Bahwa pemerintah telah mengambil arah kebijakan baru yaitu melakukan pembelian dengan tujuan utama harga padi tetap dapat dipertahankan pada tingkat yang dapat merangsang produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani, dan bukan lagi semata-mata ditujukan untuk mendapatkan beras yang cukup.

¹⁰⁴ Dalam tahun 1967 Varietas unggul IRRI (PBS dan PB8), diperkenalkan di Indonesia secara terbatas. Penggunaan Varietas ini meningkat selama program Bimas Gotong Royong, tetapi baru dalam program Bimas “yang disempurnakan” Varietas ini digunakan secara besar-besaran. *Ibid.*, hlm. 41.

Namun, pada tahun 1972 di Indonesia mengalami krisis beras yang diakibatkan oleh musim kering berkepanjangan di seluruh Asia Tenggara. Krisis beras pada tahun 1972, telah mengakibatkan harga beras naik dua kali lipat dan selanjutnya ikut mendorong inflasi yang terjadi dalam tahun 1973. Kekurangan persediaan beras yang cukup parah membuat harga beras eceran mulai naik dengan tajam dalam bulan Agustus dan September. Pada waktu itu Bulog tidak berhasil menahan kenaikan tajam harga eceran beras. Selain itu beras sulit diperoleh dari pasar dunia, karena persediaan beras dunia telah turun pada tingkat paling rendah sejak tahun 1960, dan harga beras di pasar dunia juga naik dengan tajam, karena musim kering yang melanda Asia.

Peristiwa tersebut membuat stabilitas ekonomi yang dibina sejak tahun 1969 runtuh dan mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, maka pemerintah bertekad untuk memperbaiki sistem pemasaran dan pengolahan beras di dalam negeri dengan tujuan utama melindungi kesejahteraan petani. Kebijakan baru ini menggariskan pada dibentuknya lembaga-lembaga baru di seluruh Indonesia, seperti lembaga-lembaga BUUD dan KUD.¹⁰⁵ Lembaga-lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama yaitu untuk ikut serta dalam kegiatan pembelian beras dalam negeri dan pemasarannya dalam waktu singkat. Lembaga-lembaga ini juga diharapkan berperan dalam bidang distribusi pupuk, penyuluhan pertanian dan kredit pedesaan di waktu yang akan datang.

¹⁰⁵ BUUD singkatan dari Badan Usaha Unit Desa. Kemudian berkembang menjadi KUD. KUD singkatan dari Koperasi Unit Desa, *Ibid.*, hlm. 21-23.

2. Kebijakan Fiskal

Salah satu sasaran utama kebijakan fiskal pada masa Orde Baru adalah mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan cara mendorong pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dalam negeri secara lebih efisien, khususnya sistem perpajakan.¹⁰⁶ Selain itu pemerintah Orde Baru telah menentukan beberapa kebijakan di bidang anggaran yang diarahkan kepada peningkatan penerimaan pemerintah dan menghilangkan defisit sebagai sumber inflasi.

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi¹⁰⁷ yang artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di lain pihak. Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal ini adalah pendapatan riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.¹⁰⁸

Di samping itu sasaran kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dengan sasaran yang ingin dicapai oleh negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Bagi negara yang sedang berkembang, pemerintah Indonesia berusaha untuk mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang terdiri dari pajak dan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran

¹⁰⁶ Anne Booth dan Peter McCawley, *op. cit.*, hlm. 178.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 166.

¹⁰⁸ Muhammad Suparmoko, 1987: *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek Edisi Keempat*, Yogyakarta, PT. BPFE, hlm. 260.

pemerintah. Melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dan kebijakan ini ditekankan pada peranan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), sebagai alat stabilitas moneter yang digunakan untuk membendung inflasi.

Pada tahun 1968, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan seimbang dan secara riil mulai ada perbaikan di dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah, seperti: ¹⁰⁹

1. Perbaikan administrasi dan pemungutan pajak.
2. Penggunaan sistem menghitung pajak sendiri (MPS) dan menghitung pajak orang lain (MPO).
3. Adanya fleksibilitas di dalam penentuan golongan penghasilan.
4. Pengenaan pajak penjualan atas barang-barang impor.
5. Kenaikan tarif dan penyesuaian kurs dasar penilaian impor dengan kurs BE (bonus ekspor).

Semua ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki sistem perpajakan itu sendiri. Sistem perpajakan ini diharapkan menjadi alat pendorong alokasi sumber-sumber ekonomi dalam negeri secara lebih efisien. Dalam hal ini meliputi a) pajak langsung, b) pajak penjualan dan cukai, dan c) pajak-pajak perdagangan luar negeri.

Pada Repelita I pajak langsung mengalami peningkatan dan pajak tidak langsung mengalami penurunan. Kenaikan persentase pada pajak langsung disebabkan oleh meningkatnya pajak perseroan dan MPO. Pada tahun 1969/70 jumlah realisasi pajak perseroan berjumlah Rp. 15,6 milyar dan pajak perseroan minyak jumlah realisasinya berjumlah 52,8%, yang terdiri dari penerimaan pajak langsung dan seluruh penerimaan rutin berjumlah 19,8%.

¹⁰⁹ Soeharto: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, op. cit., hlm. 398.

Seperti yang telah diketahui bahwa pajak perseroan minyak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling penting, seperti halnya dengan pajak penjualan dan cukai dalam negeri yang merupakan dua macam pajak tidak langsung yang sama pentingnya dengan pajak langsung yang ada di Indonesia. Di samping itu pajak-pajak perdagangan luar negeri juga sama pentingnya, karena pajak ini merupakan salah satu sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Orde Baru, di bawah pimpinan Soeharto. Dalam hal ini pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada pajak-pajak perdagangan luar negeri dan sasaran ini berhasil dicapai, karena penerimaan pajak-pajak atas perdagangan luar negeri, seperti pajak penjualan impor, bea masuk dan pajak ekspor menurun dari 42% menjadi kira-kira 28% dalam penerimaan domestik bukan minyak (PDBM) antara tahun 1969/1970.¹¹⁰

Perkembangan ini merupakan salah satu akibat dari kebijakan impor pemerintah yang ditujukan untuk memberikan proteksi pada industri-industri substitusi impor dalam negeri dan pajak ini lebih banyak berperan sebagai alat kebijakan proteksi daripada sebagai alat kebijakan penerimaan negara. Kebijakan tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam komposisi impor berupa pergeseran barang-barang mewah dan barang-barang konsumsi yang terkena bea masuk tinggi ke arah bahan-bahan mentah dan peralatan yang terkena bea masuk maupun pajak penjualan impor lebih rendah. Penggunaan pajak-pajak sebagai alat proteksi tersebut, selain menurunkan penerimaan negara dari sumber ini, juga telah mendorong para pengusaha industri dalam negeri untuk menggunakan

¹¹⁰ Anne Booth dan Peter McCawley, *op. cit.*, hlm. 176. Secara lengkap lihat Sumbangan dari Berbagai Unsur Penerimaan Domesti Bukan Minyak 1969/1970 (dalam %), hlm. 90-91.

teknik produksi yang padat modal. Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu penyebab meluasnya penggunaan mesin-mesin pertanian tertentu yang dalam jangka pendek, membuat masalah pengangguran di sektor pedesaan lebih parah lagi.

Sistem perpajakan di Indonesia tergolong kacau, sehingga memerlukan banyak tenaga pelaksana administrasi. Seperti yang telah diketahui bahwa jumlah pelaksana administrasi yang kompeten di Indonesia sangat terbatas. Dalam suasana yang demikian, maka pemerintah melaksanakan program stabilisasi yang terdiri dari kebijakan anggaran belanja seimbang, yang pada tahun 1968 stabilisasi ini juga dilaksanakan tetapi mengalami berbagai hambatan. Namun semenjak tahun 1969, pemerintah telah mengadakan perubahan dalam tahun anggaran, yaitu dari periode 1 Januari-31 Desember menjadi 1 April-31 Maret tahun berikutnya. Dengan dimulainya tahun anggaran yang baru ini, maka untuk bulan-bulan Januari-Maret 1969 telah diadakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersendiri.

Sebagaimana halnya dengan APBN 1968, maka APBN 1969/70 juga bersifat seimbang dalam arti jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penerimaan. Di samping itu APBN 1969/1970, merupakan suatu langkah yang lebih maju daripada APBN 1968. Hal ini disebabkan karena dalam segi pengeluaran, pemerintah mulai mengadakan penghematan-penghematan yang besar dan masih banyak yang perlu dilaksanakan untuk mengembalikan anggaran belanja negara kepada kedudukannya sebagai alat untuk manajemen dan kontrol dari pengeluaran pemerintah.

3. Kebijakan Penanaman Modal Asing

Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto mewarisi keadaan ekonomi yang sudah hampir ambruk, yakni hutang luar negeri berjumlah \$ 2,400 juta, laju inflasi mencapai 20-30% sebulan, infrastruktur berantakan, kapasitas produksi sektor-sektor industri dan ekspor sangat merosot dan penarikan pajak sudah tidak jalan lagi.¹¹¹ Dalam keadaan demikian, maka prioritas pertama dari pemerintah Orde Baru adalah stabilisasi untuk menurunkan inflasi yang beratus-ratus % pertahun dan rehabilitasi, terutama pada infrastuktur dan sektor pertanian.

Dalam hal ini, pemerintah Orde Baru berusaha meminta bantuan luar negeri, tetapi jumlah bantuan luar negeri yang diharapkan hanya beberapa ratus juta dolar setahun. Sehingga tidak cukup untuk rehabilitasi dan pembangunan aparat industri dan eksploitasi kekayaan alam. Kemudian pemerintah Orde Baru mengambil keputusan agar modal asing diberi tempat sebagai unsur modal dan teknologi, beserta tenaga ahli dan manajemennya, yang tugasnya untuk mengisi suatu kehampaan dan kekurangan pada saat itu.

Pada tanggal 1 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memperlakukan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tepatnya tanggal 3 Juli 1968.¹¹² Penanaman Modal Dalam Negeri ini sebagai UU No.6 tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang dimaksudkan untuk memberikan dorongan positif bagi industri-industri dalam negeri khususnya dan penanaman modal di sektor-sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

¹¹¹ Yahya Muhaimin, 1990: *Bisnis Dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, hlm. 51.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 52.

peternakan, pertambangan, pengangkutan, perumahan, pariwisata, prasarana dan produksi lainnya.¹¹³

Kedua Undang-undang ini dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari bantuan dan nasehat ahli-ahli ekonomi dan tenaga-tenaga profesional pada saat itu. Selanjutnya pemerintah Orde Baru mulai melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi situasi ekonomi saat itu, dengan mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri yang jumlahnya sudah melebihi \$ 2,400 juta dan upaya yang kedua adalah dengan menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi.¹¹⁴

Dengan upaya tersebut, pemerintah Orde Baru mampu mengendalikan inflasi dan perekonomian mulai normal kembali dan pemerintah Orde Baru mulai menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama tahun 1968-1973. Rencana tersebut juga dipersiapkan oleh kelompok ahli ekonomi yang sama dengan yang telah menyusun RUP (Rencana Urgensi Perekonomian) pada periode Demokrasi Terpimpin, tepatnya tahun 1956-1960. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru masih tetap menggunakan lembaga tingkat tinggi, yang dulunya dikenal sebagai Depernas yang kemudian diganti nama menjadi Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).¹¹⁵

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah akan tetap berusaha meningkatkan partisipasi modal asing sebagai peranan yang cukup

¹¹³ Soeharto: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April s/d 31 Maret 1970, op. cit., hlm. 75.*

¹¹⁴ Yahya Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 52.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

berarti dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, bank-bank asing mulai diperkenankan beroperasi di Indonesia, sehingga dapat memudahkan perusahaan-perusahaan asing menjalankan usahanya di Indonesia. Dengan tindakan ini, diharapkan bank-bank asing akan mampu melaksanakan alih teknologi dan manajemen kepada sistem perbankan Indonesia yang telah mengalami berbagai kekacauan sebagai akibat hiper-inflasi. Di samping itu pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bank-bank di Indonesia, baik bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta dengan memberikan bantuan teknik maupun dana.

Dalam sektor swasta, pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri dan perusahaan-perusahaan asing melalui penciptaan iklim ekonomi yang sehat dan menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini dilakukan agar program kredit investasi jangka menengah yang mulai diperkenalkan pada bulan April 1969 yang bertujuan untuk lebih meningkatkan investasi swasta dalam kegiatan-kegiatan yang berjangka lebih panjang dapat berperan penting dalam meningkatkan investasi swasta di berbagai sektor perekonomian. Salah satunya di bidang industri yang mendapatkan perhatian terbesar yaitu sebesar 220 aplikasi atau 65% dengan jumlah penanaman modal Rp 79.574 milyar termasuk nilai valuta asing untuk impor. Kemudian menyusul perkebunan dengan 54 proyek, pengangkutan 28 proyek, dan bidang pariwisata sebanyak 27 proyek.¹¹⁶ Selain itu sektor-sektor yang merupakan penggalian kekayaan alam seperti pertambangan

¹¹⁶ Soeharto: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)*, op. cit., hlm. 75.

merupakan salah satu faktor yang diharapkan dapat memperbaiki neraca pembayaran Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bekerjasama dengan sejumlah perusahaan internasional, seperti Freeport Sulphur yang merupakan Penanaman Modal Asing yang pertama, tepatnya tahun 1967.

Freeport Sulphur ini menandatangani sebuah kontrak besar untuk mengeksplorasi dan menambah cadangan tembaga di Irian Jaya. Menurut Undang-undang Penanaman Modal Asing, perusahaan Freeport Sulphur berhak atas persyaratan-persyaratan istimewa serta tidak perlu berdomisili di Indonesia dan juga tidak perlu menggunakan bentuk perusahaan perseroan terbatas (PT), sebagaimana pada umumnya. Dengan adanya kerjasama Freeport Sulphur dengan Indonesia, tidak menghalangi investor asing lainnya untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, karena investor asing ini memandang Indonesia memiliki daya tarik dalam bidang kekayaan alam, seperti di bidang kehutanan dan pertanian.

Kekayaan yang dimiliki Indonesia mampu membuat Indonesia menjadi negara pengekspor kayu gelondongan yang bermutu tinggi dan terbesar di dunia. Jadi hutan Indonesia merupakan persediaan kayu keras tropis yang terbesar di dunia yang dapat diusahakan secara ekonomis. Sedangkan di bidang pertanian, Indonesia memiliki sumber pertanian yang sangat luas dan beranekaragam yang dapat memberikan pengembangan yang luas dengan kapasitas yang berskala besar, baik untuk produksi bahan baku industri maupun bahan pangan dan produksi lainnya untuk pasaran dunia.

Sumber pertanian ini semakin diperkaya lagi dengan sumber-sumber perikanan darat dan perikanan laut yang dapat dikembangkan secara besar-besaran melalui usaha-usaha patungan. Perusahaan nasional Indonesia maupun perusahaan patungan telah sejak lama mengusahakan sumber kayu dan sumber pertanian yang sangat besar dan kini terbuka luas kesempatan penanaman modal di sektor industri hilir, seperti bahan bangunan dan peralatan rumah tangga, baik untuk pasaran dalam negeri maupun untuk ekspor. Dengan demikian, timbullah kesempatan kerja baru yang merupakan satu keuntungan dari Penanaman Modal Asing di sektor ekspor yang berupa peningkatan penerimaan pajak dan royalti oleh pemerintah. Namun penerimaan pajak tersebut sudah merupakan keuntungan bersih bagi perekonomian, karena pemerintah tidak mengeluarkan biaya yang berarti, misalnya untuk pembangunan prasarana yang digunakan untuk menarik Penanaman Modal Asing.

B. Bidang Sosial

1. Keluarga Berencana

Secara umum disadari bahwa pembangunan adalah suatu proses peningkatan yang terus menerus dari pendapatan per jiwa penduduk.¹¹⁷ Namun bila melihat jumlah penduduk Indonesia yang tidak menguntungkan pembangunan, maka pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto mengendalikan penduduk Indonesia secara terencana. Salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan tersebut adalah dengan program keluarga berencana.

¹¹⁷ Soeharto: *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Orde Baru. op. cit.*, hlm. 426.

Gagasan keluarga berencana itu sendiri telah berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1950. Pada tahun 1957 beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah mendirikan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sebagai badan swasta,¹¹⁸ sedangkan pemerintah sendiri saat itu secara resmi belum menyetujui. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu, Presiden Soekarno menganggap bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang besar pula untuk menggali dan mengolah sumber-sumber kekayaan Indonesia.

Namun pada tahun 1967, terjadi perkembangan yang menggembirakan, karena Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan sedunia.¹¹⁹ Dengan perkembangan situasi yang menguntungkan tersebut. Maka pada permulaan tahun 1968, Soeharto menyampaikan jiwa deklarasi tersebut dihadapan sidang DPR dan menyatakan: “Bahwa pemerintah menyetujui Program Nasional Kependudukan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah”.¹²⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, maka Soeharto mengeluarkan intruksi Nomor 26 tahun 1968.

Kemudian pada bulan September 1968, Soeharto menginstruksikan Menteri Sosial Idham Chalid agar membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional¹²¹ sebagai badan organisasi semi pemerintah di bidang program keluarga berencana. Untuk mengelola program keluarga berencana tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres Nomor

¹¹⁸ Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 338.

¹¹⁹ *Idem.*

¹²⁰ Soeharto: *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Orde Baru, op. cit.*, hlm. 433.

¹²¹ <http://www.Persaels.co.id/articlesmain>. Selasa, 5 Maret 2008, pukul 08.45.

8 tahun 1970.¹²² Lewat BKKBN inilah program keluarga berencana mulai dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya para peserta keluarga berencana secara kumulatif meningkat sekitar 1,7 juta orang pada akhir Repelita I²³ dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dengan makin meningkatnya jumlah peserta keluarga berencana setiap tahun, serta ciri-ciri mereka yang makin ke arah menguntungkan dalam penurunan fertilitas. Maka di tingkat daerah, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dibentuk pula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Daerah Tingkat I dan BKKBN Daerah Tingkat II berdasarkan pertimbangan prioritas di bawah Keppres Nomor 8 tahun 1970, wilayah penggarapan program baru ini meliputi enam propinsi di Jawa dan Bali, yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.¹²⁴

Setelah program berjalan kurang lebih dua tahun, dirasakan dengan organisasi yang ada tidak sesuai lagi dengan tingkat kemajuan dan perluasan program keluarga berencana. Di samping itu fungsi pokok BKKBN yang meliputi merencanakan, menilai, dan mengawasi belum dapat dilakukan dengan baik, karena fungsi-fungsi tersebut tidak tergambar di dalam struktur BKKBN. Atas dasar itu, Soeharto mengembangkan dan menyempurnakan organisasi BKKBN dengan Keppres Nomor 33 tahun 1972.

¹²² Soeharto: *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Orde Baru, op. cit.*, hlm. 434.

¹²³ <http://www.Persaels.co.id/articlesmain>. Selasa, 5 Maret 2008, pukul 08.45.

¹²⁴ Soeharto: *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Orde Baru, op. cit.*, hlm. 434.

Dalam Keppres Nomor 33 tahun 1972, status BKKBN diperjelas dan dipertegas sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Program keluarga berencana telah berkembang dan diperluas ke sepuluh propinsi di luar Jawa Bali yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.¹²⁵

Sementara itu pelaksanaan program keluarga berencana telah memasuki suatu tahap yang memerlukan dukungan kebijakan kependudukan, sehingga untuk itu BKKBN menerapkan beberapa kebijakan yaitu a) pengendalian kelahiran; penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak, b) perpanjangan harapan hidup, c) penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang, d) pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata, e) perkembangan dan penyebaran angkatan kerja.¹²⁶ Dengan demikian kebijakan kependudukan yang tepat dan terencana akan merupakan salah satu kunci keberhasilan Pembangunan Nasional. Keberhasilan program ini selain memerlukan organisasi dan dukungan aparat pemerintah juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang menyadari kebutuhannya. Dalam hal ini Soeharto mengatakan :¹²⁷

“Kelahiran akan terus kita kendalikan melalui peningkatan dan perluasan pelaksanaan program nasional keluarga berencana. Sedangkan tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi dan anak, diharapkan dapat menurun dengan cepat berkat bertambah baiknya taraf kesejahteraan sebagai hasil dari kemajuan pembangunan dan pelayanan kesehatan serta penyuluhan yang juga akan makin luas”.

¹²⁵ *Idem.*

¹²⁶ Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 338.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 339.

Hal ini sesuai dengan tujuan program kependudukan keluarga berencana di Indonesia yaitu mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang merupakan sumber daya manusia dengan mengendalikan kelahiran dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.¹²⁸ Dengan mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera ini diharapkan akan dapat terbentuk pola tingkah laku fertilitas di tiap-tiap keluarga yang menguntungkan bagi pengendalian jumlah kelahiran masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penggarapan program nasional keluarga berencana diarahkan kepada dua bentuk sasaran yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung yaitu dengan pemakaian kontrasepsi sedangkan sasaran tidak langsung yaitu melalui kegiatan-kegiatan kependudukan yang mendukung program keluarga berencana secara terpadu. Kegiatan ini meliputi kegiatan penerangan dan pelayanan kontrasepsi. Dalam kegiatan penerangan ini, BKKBN menjalankan kampanye KIE (komunikasi, informasi dan edukasi).¹²⁹ Kegiatan ini tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, karena kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pengertian dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha keluarga berencana. Oleh karena itu kampanye KIE ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek keluarga berencana sehingga tercapai penambahan peserta keluarga berencana baru dan membina kelestarian keluarga berencana yang telah ada, serta meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultur yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan keluarga berencana.

¹²⁸ Soeharto: *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Orde Baru, op. cit.*, hlm. 432.

¹²⁹ Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 339-340.

Dalam hal ini berbagai media massa dan peralatan dipergunakan untuk memberikan informasi tentang keluarga berencana antara lain: radio, televisi, film, penerbitan dan kegiatan sosial budaya lainnya. Sedangkan pelayanan kontrasepsi ini mempunyai tugas dan fungsi untuk mengembangkan sistem pelayanan dalam kebutuhan alat atau obat kontrasepsi. Tujuan umum pelayanan ini adalah memberikan dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan keluarga berencana, dengan demikian akan mempermudah tercapainya tujuan pokok yaitu penurunan angka kelahiran yang berarti.¹³⁰ Hal ini juga didukung oleh tenaga medis atau paramedis dan penyediaan obat atau alat kontrasepsi yang dilakukan lewat usaha klinik keluarga berencana.

Klinik keluarga berencana ini sejak awal kegiatan sudah menjadi sarana pelayanan kontrasepsi yang meliputi tentang penerangan keluarga berencana agar peserta dapat memilih alat kontrasepsi yang disenangi dan melakukan bimbingan dan pelayanan medis sebaik-baiknya agar peserta menjadi puas dan meneruskan penggunaan alat kontrasepsi serta mengingatkan kunjungan ulang pada waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka penanganan masalah kependudukan dan keluarga berencana dapat terlaksana dengan baik dan pemerintah Indonesia mendapat acungan jempol dunia internasional, karena mampu menekan pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi 1,66% per tahun dan angka kematian kasar 44,0 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 1971.¹³¹

2. Transmigrasi

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 341.

¹³¹ <http://www.Persaels.co.id/articlesmain>. Selasa, 5 Maret 2008, pukul 08.45.

Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan terdiri dari sekitar 13.000 pulau besar dan kecil serta wilayahnya yang sangat luas dengan potensi sangat besar.¹³² Namun kenyataannya menunjukkan bahwa wilayah Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan penyebaran penduduknya yang sangat tidak seimbang. Di mana Pulau Jawa, Bali, Madura dan Lombok yang luasnya wilayahnya hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia harus menanggung beban jumlah penduduk 65% dari segenap penduduk di seluruh tanah air Indonesia. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat besar dari tahun ke tahun, menimbulkan masalah kependudukan di Indonesia.¹³³

Untuk mencapai keseimbangan yang rasional dan efisien dalam usaha mengatasi persoalan rasional itu, maka pemerintah sejak tahun pertama Repelita telah memasukkan program transmigrasi sebagai sarana pembangunan yang penting baik ditinjau dari segi pengembangan proyek-proyek Pembangunan nasional maupun regional. Melalui program transmigrasi ini, diharapkan mampu melakukan pemerataan penyebaran penduduk di dalam negeri maupun masalah yang makin mendesak.

Di samping untuk menyebarkan penduduk dan tenaga kerja, transmigrasi juga ditujukan untuk pemindahan penduduk dalam rangka penyediaan tenaga kerja untuk proyek-proyek pembangunan yang memerlukan tenaga kerja di luar Jawa. Proyek-proyek ini meliputi: a) proyek pertanian dalam rangka pembukaan persawahan pasang-surut di Kalimantan dan Sumatera, b) proyek-proyek peningkatan produksi, ekspor kayu dan hasil hutan lainnya, c) proyek-proyek

¹³² Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, *op. cit.*, hlm. 2.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 7. Secara lengkap lihat gambar proses penyelenggaraan transmigrasi, hlm. 92.

rehabilitasi dan pembangunan prasarana, dan d) proyek-proyek pembangunan usaha-usaha pertanian, perkebunan dan perikanan.¹³⁴ Dengan demikian, tujuan dilaksanakan transmigrasi bukan hanya penyebaran penduduk semata, tetapi lebih ke pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerah yang jarang penduduknya, sehingga produksi nasional dapat terus meningkat demikian juga martabat kemanusiaannya.

Pada saat itu dikenal tiga jenis transmigrasi yaitu transmigrasi umum yang dibiayai oleh pemerintah dan transmigrasi swakarsa atau spontan yang pelaksanaannya dilakukan atas prakarsa transmigran yang bersangkutan atau pihak lain bukan pemerintah dan juga ada transmigrasi ABRI yang merupakan transmigrasi dari para anggota ABRI yang telah bebas tugas dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga-tenaga pioner dalam transmigrasi,¹³⁵ karena mereka memiliki faktor-faktor disiplin dan ketrampilan.

Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi bukanlah menjadi tugas pemerintah semata, melainkan secara berangsur-angsur khususnya segi pembiayaan dapat dipikul oleh masyarakat juga, tapi tidak berarti dari segi tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan menyerahkannya kepada masyarakat. Pemerintah tetap memberi petunjuk-petunjuk, bimbingan dan pembinaan, seperti penyediaan areal dan bantuan. Adapun yang telah ditetapkan sebagai daerah transmigrasi pada saat itu adalah propinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Daerah

¹³⁴ *Idem.*

¹³⁵ Soeharto: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)*, *op. cit.*, hlm. 259.

Istimewa Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.¹³⁶

Dalam pelaksanaannya, para calon transmigrasi harus lebih dulu diberi penerangan umum dan pendaftaran calon transmigran, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan seleksi calon transmigran. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, agar setelah berada di daerah baru para transmigran memperoleh bimbingan dan tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupun rohaniah, sehingga akan terbentuk suatu masyarakat yang merupakan kesatuan ekonomi, sosial, budaya dan geografis yang mampu berkembang menuju tingkat desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada.

Di daerah yang baru ini, para peserta transmigrasi umum memperoleh hak yaitu a) mendapat satu buah rumah berikut sarana air minum dan sanitasi, b) mendapat tanah seluas 2 Ha yang terdiri dari $\frac{1}{4}$ Ha tanah pekarangan, satu Ha lahan usaha I dan usaha II yang harus dibuka sendiri seluas $\frac{3}{4}$ Ha, c) bagi transmigran yang bukan petani mendapat tanah $\frac{1}{4}$ Ha, dan d) mendapat jatah jaminan hidup yang terdiri dari beras (suami 17,5 Kg, istri 10 Kg, anak 7,5 Kg/jiwa/bulan), ikan asin 5 Kg/KK/bulan, garam 2 Kg/KK/bulan, gula pasir 3 Kg/KK/bulan, minyak goreng 3 Kg/KK/bulan, minyak tanah 8 liter/KK/bulan dan sabun cuci 1 Kg/KK/bulan.¹³⁷ Jaminan tersebut diberikan selama 12 bulan untuk lahan kering dan 18 untuk daerah pasang surut. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan alat pertanian dan kebutuhan usaha pertanian lainnya.

¹³⁶ Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, *op. cit.*, hlm. 5.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Dalam Negeri juga menyelesaikan status tanah para transmigran dengan pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah.

Untuk transmigrasi swakarsa atau spontan sebagai sasaran akhir penyelenggaraan transmigrasi, maka pemerintah melakukan kebijakan umum yang ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi swakarsa yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai usaha peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.¹³⁸

Usaha pemerintah untuk mendorong transmigran swakarsa atau spontan memang sangat tepat, karena terbukti berhasil. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk hidup lebih baik timbul dari dirinya sendiri serta mereka mempersiapkan diri di tempat yang baru karena menyadari di sana tak ada lagi keluarga untuk bergantung. Maka di tempat yang baru tersebut, mereka berbaur langsung dengan masyarakat baru, timbul inisiatif dan juga semangat hidup serta daya penyesuaian yang tinggi.

Dengan demikian pelaksanaan transmigrasi swakarsa secara bertahap mengurangi beban anggaran pemerintah, mengembangkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional serta berperan memecahkan masalah masalah kependudukan, tenaga kerja dan masalah pangan dalam rangka pembangunan dan ketahanan daerah. Pemanfaatan transmigrasi swakarsa atau spontan sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 3/1972 secara maksimal

¹³⁸ Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 335.

akan sangat mendukung keberhasilan program transmigrasi¹³⁹ dan juga berperan menunjang pembangunan program-program sektoral di luar Jawa dan memberi pengaruh positif terhadap daerah yang ditinggalkan.

3. Tenaga Kerja

Kebijakan utama di bidang tenaga kerja ialah menciptakan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan menampung pertambahan tenaga kerja.¹⁴⁰ Namun, hal ini sulit untuk dilakukan karena dilihat dari latar belakang masalah penduduk Indonesia yang mempunyai ciri-ciri yaitu pertambahan jumlah penduduk yang cepat, urbanisasi yang cepat dan adanya beban yang besar terhadap banyaknya penduduk yang berusia 15 tahun ke bawah yang sudah bekerja dan sudah menikah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan sosial lainnya perlu diberikan pertimbangan atas dasar perluasan kesempatan kerja, agar dapat menunjang kemampuan ekonomi di daerah-daerah maupun di pedesaan.

Namun, dengan adanya kebijakan tersebut masalah ketenagakerjaan di negara Indonesia tetap ada. Hal ini berkisar pada ketidakseimbangan yang bersifat struktural yakni:¹⁴¹

- a. Pertumbuhan angkatan kerja tinggi, di mana pertumbuhan penduduk rata-rata 2,34% per tahun, dan terbatasnya lapangan kerja produktif yang

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 338.

¹⁴⁰ Soeharto: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)*, *op. cit.*, hlm. 227.

¹⁴¹ Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, *op. cit.*, hlm. 2-3. Secara lengkap lihat lampiran tabel penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan pendidikan yang ditamatkan, hlm. 93.

dapat menyebabkan adanya kelebihan tenaga kerja secara umum dalam ekonomi Indonesia.

- b. Ketidakseimbangan dalam struktur umur angkatan kerja menimbulkan masalah penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang berusia muda dan pada umumnya mereka mempunyai pengalaman kerja yang kurang.
- c. Adanya ketidakseimbangan dalam penyebaran angkatan kerja secara geografis, di mana luas pulau Jawa-Madura, Bali dan Lombok hanya 7% dari luas seluruh Indonesia. Hal ini erat hubungannya dengan penyebaran potensi sumber alam, khususnya tanah pertanian yang dapat mengakibatkan hambatan dalam memanfaatkan tenaga kerja yang ada secara optimal.
- d. Adanya ketidakseimbangan di antara jenis dan jumlah tenaga kerja yang dihasilkan melalui sistem pendidikan dan latihan.
- e. Adanya pasar kerja yang belum berfungsi sepenuhnya dalam menyebarkan tenaga kerja, serta belum terserapnya tenaga kerja yang tersedia. Hal ini menimbulkan masalah sampingan yang kurang menguntungkan tenaga kerja, seperti syarat kerja, kondisi kerja dan upah yang kurang layak.

Dengan ketidakseimbangan tersebut, membuat pemerintah Indonesia belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup untuk menyerap sepenuhnya dari angkatan kerja yang ada, terutama di kalangan pencari kerja dan setengah pengangguran.

Seperti yang telah diketahui, bahwa tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran mengakibatkan kemiskinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin pada rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan pokok dan tidak sesuai dengan hakekat pembangunan yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan tenaga kerja yang merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan, dan tingkat kesejahteraannya merupakan ukuran kemakmuran bangsa, maka untuk itu pemerintah Indonesia bertekad untuk melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan secara terus menerus.¹⁴² Di samping itu pemerintah mulai melakukan usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan di bidang

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 3.

ketenagakerjaan dengan menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup sesuai dengan keahlian yang diperlukan dan sesuai dengan perkembangan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah menyarankan agar penyaluran tenaga kerja ini melalui program penciptaan kesempatan kerja dan padat karya.

Program ini mulai dilaksanakan sejak Repelita I dan dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, agar usaha menciptakan kesempatan tenaga kerja terwujud. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengarahkan usaha pembangunan ke daerah pedesaan yang dimaksudkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, program perluasan kesempatan kerja ke pedesaan telah mendapat tempat penting di dalam menentukan prioritas pembangunan prasarana, seperti irigasi, jalan-jalan, dan penghijauan. Demikian juga pembangunan di sektor industri termasuk industri pariwisata, turut meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Sejalan dengan usaha jangka panjang ini, pemerintah mulai melaksanakan proyek Padat Karya. Melalui proyek Padat Karya ini, pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan tenaga sebanyak-banyaknya dengan biaya yang relatif kecil. Itulah sebabnya proyek Padat Karya dilakukan di daerah-daerah yang banyak pengangguran dan setengah pengangguran serta diutamakan di Pulau Jawa dan Madura. Proyek Padat Karya ini dapat dikatakan sukses, karena para pekerja yang pada mulanya hanya dapat memperoleh imbalan dalam bentuk

natura, tetapi sejak tahun 1972/73 sebagian pekerja sudah mulai diberikan bentuk uang di samping diberikan bantuan peralatan kerja yang sangat dibutuhkan.



BAB IV

SUMBANGAN SOEHARTO DALAM REPELITA I (1968-1973)

DI BIDANG EKONOMI, DAN SOSIAL

Pada masa Orde Baru tuntutan dan tekad bangsa Indonesia untuk bangkit membangun kesejahteraan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, tidak bisa dicapai sekaligus. Hal ini harus diperjuangkan lewat pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia. Dewasa ini bangsa Indonesia telah mulai melakukan proses pembangunan secara berencana yang dituangkan dalam Repelita. Rencana pembangunan tersebut tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional yaitu membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya.¹⁴³ Di bawah pemerintahan Orde Baru, Soeharto mampu membangun bangsa Indonesia untuk hidup lebih baik. Hal ini tampak dalam beberapa bidang yaitu:

A. Bidang Ekonomi

1. Peningkatan Produksi Pangan

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Tujuan dari pembangunan pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan.¹⁴⁴ Sebab penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat secara adil dan merata. Peningkatan produksi pangan khususnya beras merupakan prioritas utama dan peningkatan produksi pangan ini berpengaruh

¹⁴³ Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 315.

¹⁴⁴ Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, *op. cit.*, hlm. 6.

besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu harga pangan dalam negeri dapat lebih dimanfaatkan dan dengan begitu turut memberi pengaruh yang positif pada stabilisasi ekonomi.

Peningkatan produksi pangan tersebut dilakukan dengan menyediakan pupuk, insektisida, pestisida dan bahan kimia lainnya yang digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti produksi beras yang mengalami kenaikan sebesar 46,5%, produksi bahan ekspor (kelapa sawit) naik sebesar 59,8%, dan produksi minyak bumi naik sebesar 50,1%.¹⁴⁵ Dengan adanya peningkatan tersebut, memungkinkan dikurangi impor beras dari luar negeri, dan dengan demikian turut memberi sumbangan bagi usaha penghematan devisa. Ini berarti usaha pemerintah yang terus-menerus dalam peningkatan varietas padi baru yang lebih unggul dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang berswasembada pangan dan mengubah posisi negara Indonesia yang semula adalah negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi pengeksport. Dengan meningkatkannya produksi pertanian, maka lain-lain sektor turut pula terangsang pembangunannya, seperti sektor industri yang menghasilkan bahan-bahan baku yang diperlukan oleh sektor pertanian.

Sektor industri ini menghasilkan bahan baku, seperti pupuk, insektisida, pestisida dan bahan kimia lainnya akan ikut terangkat oleh peningkatan produksi pertanian, sehingga terbukalah kesempatan untuk memperluas produksi dari bahan-bahan tersebut. Hal ini berarti bahwa permintaan akan barang-barang

¹⁴⁵ Soeharto: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, op. cit., hlm. 387. Secara lengkap lihat tabel sasaran fisik rencana pembangunan lima tahun, hlm. 94.

industri mulai menampakkan diri, sehingga merangsang pembangunan industri yang melayani kebutuhan di sektor pertanian, seperti penggilingan padi.

Seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan industri sebagai bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang yang diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi yang dititikberatkan pada industri yang maju dan didukung oleh pertanian yang tangguh.¹⁴⁶ Pembangunan industri tersebut ternyata dapat memperluas kesempatan kerja dan dapat meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan impor dan mendorong ekspor hasil industri guna memperbesar penerimaan devisa yang diperlukan untuk peningkatan pembangunan di Indonesia.

B. Bidang Sosial

1. Kesejahteraan Rohani

Penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa ini memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut, Soeharto ingin menciptakan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan beragama. Untuk membina kehidupan beragama dan menjaga keserasian hubungan antar umat beragama dan umat agama yang lain serta antar umat agama dan pemerintah, maka Soeharto mendirikan sebuah departemen agama dalam pemerintahan. Departemen agama ini merupakan salah satu ciri khusus yang dimiliki negara Republik Indonesia yang berdasarkan

¹⁴⁶ Ade Rudi, 1993: *Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa*, Jakarta, Yayasan Dharma Bhakti Putra Wira Purna Yudha, hlm. 261.

Pancasila bukan berdasarkan negara agama. Dalam hal ini Soeharto mengatakan:¹⁴⁷

“Kalau sekarang ini kita berusaha memantapkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional, sungguh tidak ada sama sekali pikiran bahwa dengan usaha ini kita ingin mengecilkan peranan agama dalam kehidupan bangsa kita. Baik Pancasila apalagi agama, keduanya sangat menekankan aspek moral dan akhlak. Dan moral Pancasila jelas justru menjamin dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk pengembangan kehidupan beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing”.

Selanjutnya Soeharto menekankan: “Kehidupan keagamaan bangsa kita harus dikembangkan ke arah keberagaman yang dewasa dan cerdas”.¹⁴⁸

Dalam hal ini kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional ditegaskan pada rumusan Pancasila dalam pembukaan dan pasal 29 UUD 1945.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 29 UUD 1945, secara jelas dinyatakan :¹⁴⁹

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Jika diresapi, ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Soeharto berkewajiban untuk membina, memelihara, dan mengembangkan ketaqwaan, budi pekerti dan kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita bangsa.¹⁵⁰ Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang agama yakni: a) untuk mewujudkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¹⁴⁷ Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 315.

¹⁴⁸ *Idem.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 316.

¹⁵⁰ Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, *op. cit.*, hlm. 4.

b) memantapkan kadar keimanan dan ketaqwaan antar umat beragama, c) meningkatkan upaya penanggulangan dampak negatif dari modernisasi, dan d) memperluas wawasan keagamaan yang tetap bertumpu pada iman menurut agamanya masing-masing.¹⁵¹ Di samping itu juga memantapkan pembinaan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama dan ternyata pembinaan ini sangat berhasil, karena peran serta tokoh dari masing-masing umat.

Kemudian pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Soeharto membentuk majelis antar umat beragama Indonesia yang merupakan forum komunikasi-konsultasi dan koordinasi antar umat beragama satu dengan lainnya dan juga antar umat beragama dengan pemerintah tanpa kehilangan ciri kemandiriannya. Bahkan pemerintah mampu meningkatkan penerangan dan penyuluhan agama serta usaha bimbingan hidup beragama, baik untuk agama Islam, Kristen/Protestan, Katholik maupun Hindu dan Budha.

Pembinaan mental agama bagi masyarakat Indonesia telah disediakan sejumlah peralatan penerangan, seperti pengeras suara, proyektor film, buku-buku dakwah atau penerangan agama, majalah dan brosur-brosur. Selama Repelita I hasil yang telah dicapai dalam kegiatan penerangan dan dakwah agama meliputi:¹⁵²

- a. Penerangan dan Dakwah Agama Islam
 - 1) Pendistribusian buku/ brosur/ majalah sebanyak 2.574 eksemplar.
 - 2) Memberikan dakwah terhadap suku-suku terasing di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Jambi dan Sumatera Barat.
 - 3) Penyuluhan dan pembinaan mental agama kepada masyarakat transmigran dan para Tapol di Pulau Buru.

¹⁵¹ Ade Rudi, *op. cit.*, hlm. 347.

¹⁵² *Idem.*

- b. Penerangan dan Dakwah Agama Kristen/Protestan
 - 1) Pendistribusian buku/ brosur/ majalah sebanyak 109.700 eksemplar.
 - 2) Memberikan dakwah bagi Tapol di Pulau Buru, suku terasing di Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.
 - 3) Menyediakan alat-alat penerangan agama untuk propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
 - 4) Memberikan bimbingan penerangan kepada Pemimpin Gereja Kristen di Indonesia.
- c. Penerangan dan Dakwah Agama Katholik
 - 1) Pendistribusian buku/ brosur/ majalah sebanyak 57.000 eksemplar.
 - 2) Memberikan paket dakwah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jakarta dan Tapol di Pulau Buru sebanyak 2.600 set.
 - 3) Operasi penerangan agama Katholik pada masyarakat Katholik di Mentawai dan Tengger.
 - 4) Memberikan dakwah untuk suku terasing dan masyarakat khusus di propinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, Maluku, dan Irian Jaya.
- d. Penerangan dan Dakwah Agama Hindu dan Budha
 - 1) Pendistribusian buku/ brosur/ majalah Dharma Duta sebanyak 24.268 eksemplar.
 - 2) Memberikan dakwah kepada masyarakat suku Tengger di Jawa Timur, suku Painan di Kalimantan Timur serta masyarakat Hindu dan Budha di Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya pemerintah memberikan bantuan dalam penyediaan prasarana dan sarana kehidupan beragama, seperti penyediaan kitab-kitab suci dan bantuan pembangunan atau rehabilitasi tempat beribadatan. Hasil-hasil yang dicapai dalam penyediaan kitab-kitab suci selama Repelita I adalah bagi umat Islam berjumlah 553.100 buah, bagi umat Kristen/Protestan berjumlah 55.331 buah, bagi umat Katholik berjumlah 16.887 buah, dan bagi umat Hindu dan Budha berjumlah 32.812 buah.¹⁵³ Pengadaan kitab-kitab suci tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kitab-kitab suci, di samping itu juga untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat khususnya para ahli dan penerbit agar

¹⁵³ *Idem.*

dalam mengembangkan metode penafsiran kitab suci yang sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Mengenai bantuan pembangunan atau rehabilitasi tempat peribadatan, pemerintah berusaha untuk membangun tempat ibadat di daerah pedesaan, daerah pemukiman baru, daerah pemusatan industri, daerah rawan dan daerah suku terasing, transmigran dan daerah perbatasan. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi tersebut diberikan dalam bentuk biaya pembangunan atau rehabilitasi untuk tempat ibadat dan bantuan berupa sarana atau alat ibadah dan buku-buku keagamaan. Ternyata bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat merangsang kegiatan swadaya masyarakat untuk membangun tempat peribadatan dan kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahun. Demikian pula kegiatan keagamaan lainnya semakin meningkat, seperti pengajian dan majelis Taklim yang semakin luas.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan :

1. Soeharto merupakan seorang anak petani dari Kemusuk, Argamulya, Godean, Yogyakarta dengan ayahnya bernama Kertosudiro dan ibunya bernama Sukirah. Soeharto memulai pendidikannya, sewaktu berumur 8 tahun. Pendidikan yang ditempuh, antara lain sekolah rakyat di Godean, sekolah lanjutan (*Vokschool*) di Wonogiri, Schakel Muhammadiyah di Yogyakarta, sekolah militer di Gombong, sekolah kader di Gombong, sekolah latihan militer lanjutan (*Kyokutai*) di Bogor, dan SESKOAD di Bandung. Sedangkan perjalanan karir militernya dimulai sewaktu menjadi prajurit di Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) sampai menjadi Presiden RI yang kedua menggantikan Presiden Soekarno.
2. Kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) adalah memperbaiki segala kehidupan bangsa Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Di bidang ini Soeharto ingin memperbaiki ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintah Orde Lama, yakni hutang luar negeri berjumlah \$ 2,400 juta, laju inflasi mencapai 20-30% sebulan, infrastruktur berantakan, kapasitas produksi sektor-sektor industri dan ekspor sangat merosot dan penarikan pajak sudah tidak jalan lagi. Dalam keadaan demikian, maka pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto mulai mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri yang jumlahnya sudah melebihi \$ 2,400 juta dan menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Sumbangan Soeharto pada Repelita I bagi bangsa Indonesia adalah adanya peningkatan produksi pangan, khususnya beras. Peningkatan ini dilakukan dengan menyediakan pupuk, insektisida, pestisida, dan bahan kimia lainnya, agar hasil produksi pertanian meningkat, seperti produksi beras yang mengalami kenaikan sebesar 46,5%, produksi bahan ekspor (kelapa sawit) naik sebesar 59,8%, produksi minyak bumi naik sebesar 50,1%. Dengan meningkatnya produksi pertanian, maka lain-lain sektor turut pula terangsang pembangunannya, seperti sektor industri. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari segi keamanan, karena negara yang aman dan damai mampu menciptakan suasana yang tenang dan mampu memperbaiki negara yang sedang kacau. Selain itu Soeharto juga mengandalkan ahli-ahli ekonomi atau teknokrat untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang pada waktu itu sedang terpuruk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Gafur,
1987, *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Ade Rudi,
1993, *Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa*, Jakarta : Yayasan Dharma Bhakti Putra Wira Purna Yudha.
- Berkhofer, Robert F. Jr.,
1969, *A Behavioral Approach To Historical Analysis*, New York : The Free Press.
- Booth, Anne dan Peter McCawley,
1982, *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta : PT. Djaya Pirusa.
- Bustanil Arifin,
1993, *Pangan Dalam Orde Baru*, Jakarta : Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO).
- Bustomo Hadjid Ronodirdjo, Yatono Atmoprayitno, dkk,
1983, *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia: Evaluasi Pemerintah Orde Baru*, PT. Yayasan Dana Bantuan.
- CSII,
1952, *Industrialisasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi CSII.
- Dagun Save M,
1997, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : LPKN.
- Djamin Zulkarnain,
1984, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama*, Jakarta : Lembaga Penerbit.
- Dwipayana, G, dan Nazaruddin Sjamsuddin,
1991, *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*, Jakarta : PT. Citra Lamtara Gung Persada.
- Eriyanto,
2000, *Kekuasaan Otoriter Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni Studi Atas Pidato-pidato Politik Soeharto*, Pustaka Pelajar Insist.

- Eryono. A,
1949, *Mengenang Perjuangan Letkol Soeharto di Yogyakarta*, Yogyakarta : Yayasan 1 Maret 1949.
- Gilarso. T,
1986, *Ekonomi Indonesia, Sebuah Pengantar, Jilid I*, Yogyakarta : Kanisius.
- Gottschalk, Louis,
1975, *Mengerti Sejarah*, Jakarta : UI Press.
- Hassan Shadily,
1984, *Ensiklopedi Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Hendra Esmara,
1987, *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Jamaluddin Haris Wartono,
2003, *Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia; Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Koentowijoyo,
1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Benteng Budaya.
- Mears, Leon. A,
1982, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Moedjanto, G,
1988, *Indonesia Abad Ke-20, Jilid I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, Yogyakarta : Kanisius.
- Mohammad Hatta,
1985, *Membangun Ekonomi Indonesia*, Inti I Dayu Press.
- Mohammad Suparmoko,
1987, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi Keempat*, Yogyakarta : PT. BPFE.
- Mohtar Mas' oed,
1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta : LP3ES.
- Papenek, Gustaf. F,
1981, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia.

- Program Studi Pendidikan Sejarah,
2003, *Buku Pedoman Program Pendidikan Sejarah*, Yogyakarta :
Universitas Sanata Dharma.
- Rieklefs, Malvin Calvin,
2001, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta : Pustaka Yayasan
Adikarya Ikapi.
- Roeder, O.G,
1969, *Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden*, Jakarta : PT. Gunung
Agung.
- _____,
1976, *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Sabarija Poerwadarminta Wilfridus Josep,
1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta : PN Bali
Pustaka.
- Sartono Kartodirdjo,
1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, Peter dan Yenny Salim,
1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*, Jakarta :
Modern English Press.
- Samuelson, Paul. A,
1975, *Teori Ekonomi I*, Jakarta : Bhatara.
- Sjahrir et al,
1989, *Menuju Masyarakat Adil Makmur, 70 Tahun Prof. Sarbini
Sumawinata*, Jakarta : PT. Gramdia.
- Soeharto,
1967, *Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1967 di Depan Sidang DPR-GR*,
Jakarta : Doa Restu.
- _____,
1969, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia
Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, Jakarta : Yayasan Veteran
Republik Indonesia.
- _____,
1970, *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan
Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1*

April 1969 s/d 31 Maret 1970), Jakarta : Departemen Penerbangan Republik Indonesia.

1989, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi* seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., Jakarta : P.T. Citra Lamtara Gung Persada.

Soekartawi,
1994, *Pembangunan Pertanian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soepradjo,
1990, *45 Tahun Departemen Pekerjaan Umum*, Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.

Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun,
1984, *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I-Pelita II-Pelita III*, Jakarta : PT. Dumas Sari Warn.

Sri Sukei Adiwimarta,
1983, *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II*, Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suripto,
1972, *Soeharto Suatu Sketsa Karier dan Politik*, Surabaya : GRIP.

Suwarno, P.J.,
2004, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Supersemar)*, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

2004, *Proses Sukses Presiden Republik Indonesia 1966-1978*, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia, Nazaruddin Sjamsuddin,
1992, *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1969-23 Maret 1973*, Jakarta : PT. Citra Lamtara Gung Persada.

Tjahyadi Nugroho,
1984, *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, Semarang : Yayasan Telapak.

Yahya Muhaimin,
1990, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta : LP3ES.

Internet :

<http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto>. 20 Februari 2008 pukul 14.05.

<http://www.Persoeis.co.id/articlesmain>. 5 Maret 2008 pukul 08.45.

<http://www.alislamu.com/index.php?option=com>. 27 Maret 2008 pukul 08.55.

<http://images.google.co.id/images?q=foto+Soeharto&hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=3zl&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=images&ct=title>, 13 Mei 2008, Selasa jam 11.42.

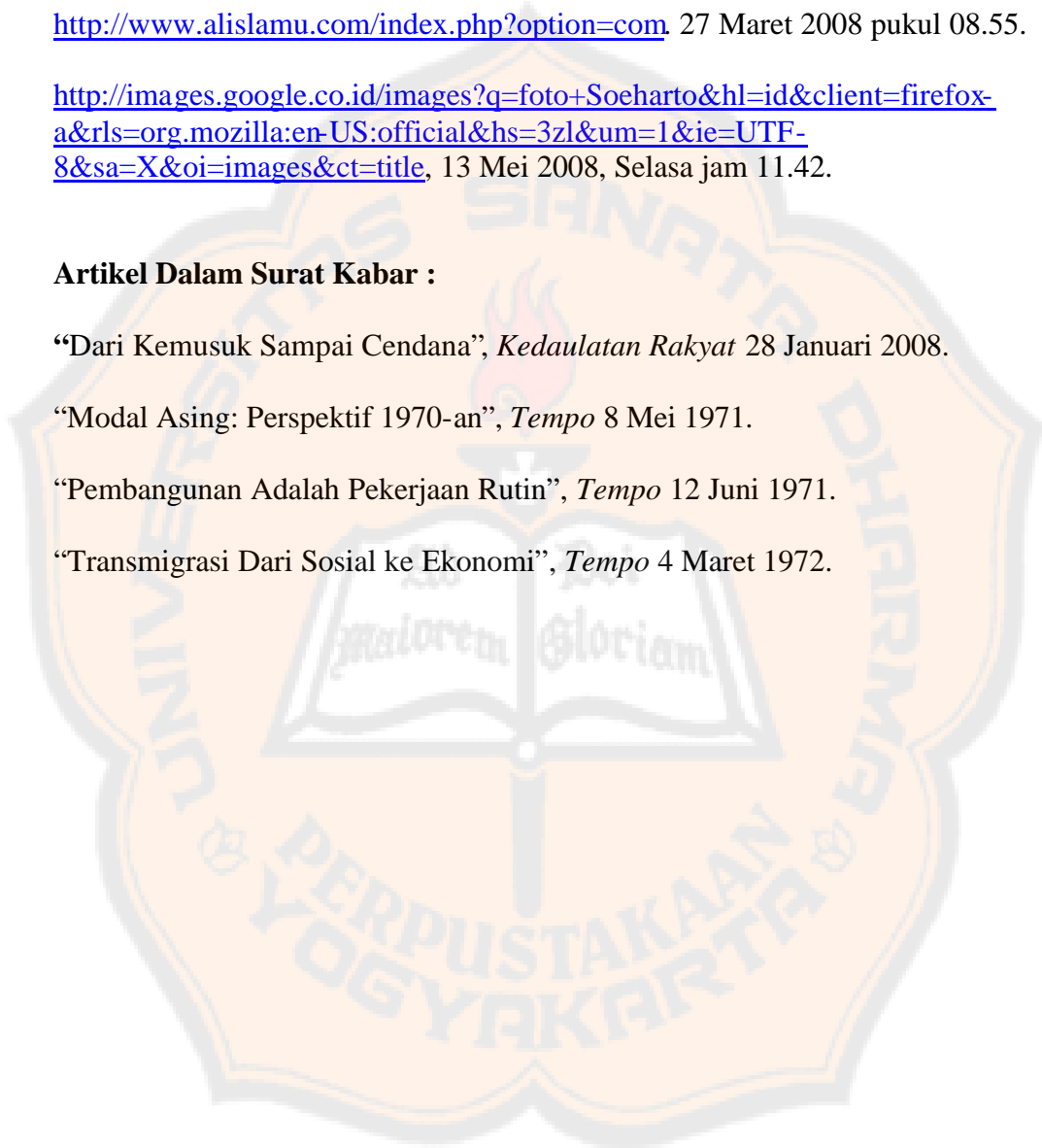
Artikel Dalam Surat Kabar :

“Dari Kemusuk Sampai Cendana”, *Kedaulatan Rakyat* 28 Januari 2008.

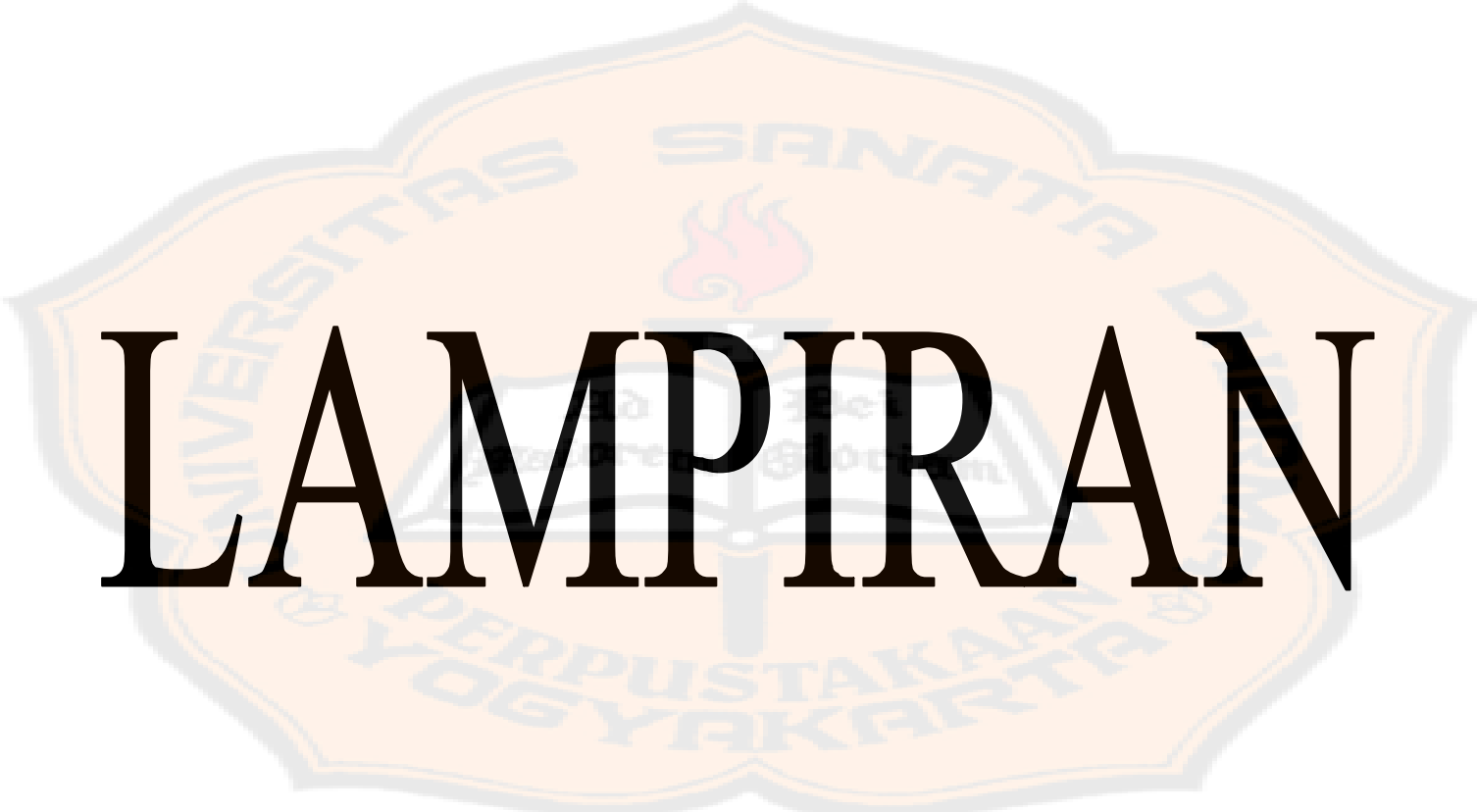
“Modal Asing: Perspektif 1970-an”, *Tempo* 8 Mei 1971.

“Pembangunan Adalah Pekerjaan Rutin”, *Tempo* 12 Juni 1971.

“Transmigrasi Dari Sosial ke Ekonomi”, *Tempo* 4 Maret 1972.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



PRESIDEN SOEHARTO

Sumber :

<http://images.google.co.id/images?q=foto+Soeharto&hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=3zl&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=images&ct=title>, 13 Mei 2008, Selasa jam 11.42.

LAMPIRAN II

- I. Pimpinan Kabinet : Jenderal Soeharto
- II. Menteri-menteri
1. Menteri Dalam Negeri : Letjen. Basuki Rahcman
 2. Menteri Luar Negeri : H. Adam Malik
 3. Menteri Pertahanan/
Keamanan : Jenderal Soeharto
 4. Menteri Kehakiman : Prof. Oemar Senoadji SH
 5. menteri Penerangan : Laksada. (U) Budiardjo
 6. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Ali Wardhana
 7. Menteri Perdagangan : Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo
 8. Menteri Pertanian : Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja
 9. Menteri Perindustrian : Mayjen. M Jusuf
 10. Menteri Pertambangan : Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro
 11. Menteri Pekerjaan Umum
dan Tenaga Listrik : Ir. Soetami
 12. Menteri Perhubungan : Drs. Frans Seda
 13. Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan : Mashuri SH
 14. Menteri Kesehatan : Prof. Dr. GA Siwabessy
 15. Menteri Agama : KH Muh. Dahlan
 16. Menteri Tenaga Kerja : Laksda. (L) Mursalin Daeng Mamangung
 17. Menteri Sosial : Dr. AM Tambunan
 18. Menteri Transmigrasi
dan Koperasi : Letjen. Sarbini
 19. Menteri negara yang
membantu Presiden
dalam mengkoordinir
kegiatan-kegiatan di
bidang ekonomi

- keuangan dan
perindustrian : Sultan Hamengku Buwono IX
20. Menteri negara yang
membantu Presiden dalam
mengkoordinir kegiatan-
kegiatan di bidang
kesejahteraan rakyat : K.H Dr. Idham Chalid
21. Menteri negara yang
membantu Presiden
dalam penyempurnaan
dan pembersihan
Aparatur Negara : H. Harsono Tjokroaminoto
22. Menteri negara yang
membantu Presiden
dalam pengawasan
proyek-proyek pemerintah : Prof. Dr. Soenawar Soekowati
23. Menteri negara yang
membantu Presiden
dalam penyelenggaraan
hubungan antara
pemerintah dengan MPR,
DPR-GR, dan DPA : HMS Mintaredja SH.

Susunan kabinet ini mengalami perubahan pada tanggal 9 September 1970, yakni sebagai berikut :

1. Menteri Agama : Prof. Dr. Mukti Ali
2. Menteri Tenaga Kerja : Prof. Dr. M Sadli
3. Menteri Sosial : HMS Mintaredja SH
4. Menteri negara urusan
perencanaan dan
pembangunan : Prof. Dr. Widjojo Nitisastro

5. Menteri negara
penyempurnaan dan
pembersihan Aparatur
Negara : Prof. Dr. Emil salam
6. Menteri negara urusan
pertahanan dan keamanan : Jenderal M Panggabean

Jabatan menteri negara penghubung pemerintah dengan MPRS/DPR-GR/DPA dihapuskan.

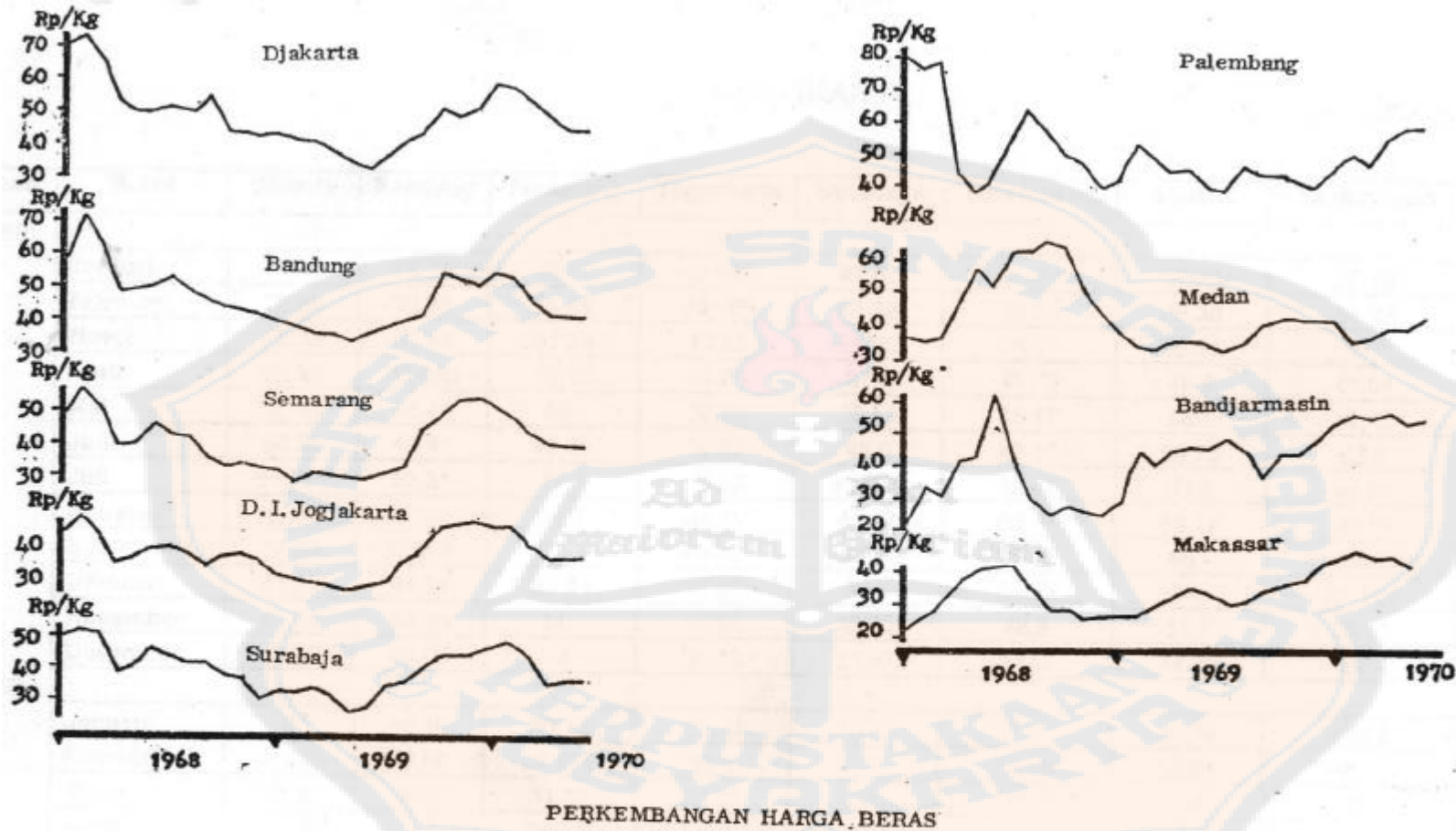
**Susunan Kabinet Pembangunan I
(1968-1973)**

Sumber:

Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia, Nazaruddin Sjamsuddin, 1992: *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1969-23 Maret 1973*, Jakarta, PT. Citra Lamtara Gung Persada, hlm. 521-522.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN III



Sumber:
Soeharto, 1970: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)*, Jakarta, Departemen Penerbangan Republik Indonesia, hlm. 101.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN IV

Tahun	Bulan	Jakarta	Bandung	Semarang	Yogyakarta	Surabaya	Palembang	Medan	Banjarmasin	Makasar
1968	Januari	71,49	56,75	48,11	42,935	47,57	81,055	37,23	20,18	22,82
	Februari	73,85	72,95	56,99	49,155	51,38	75,95	36,38	34,25	26,35
	Maret	65,68	61,49	51,29	43,25	50,355	78,87	36,53	30,-	30,82
	April	53,55	48,055	39,35	34,05	37,8	45,07	46,6	41,94	37,45
	Mei	50,595	48,41	40,-	36,29	39,58	38,47	58,3	42,49	40,27
	Juni	50,39	49,81	46,25	39,93	46,5	42,53	50,75	62,5	41,8
	Juli	51,675	52,81	42,5	40,52	43,975	53,47	63,6	43,25	41,8
	Agustus	49,96	48,52	41,5	37,29	41,32	63,77	64,17	30,15	35,17
	September	54,94	46,275	35,5	34,46	42,-	57,25	66,-	24,5	27,8
	Oktober	43,89	44,24	33,74	37,67	38,-	49,95	64,-	27,225	27,6
	Nopember	44,02	43,35	34,-	37,55	36,23	46,8	51,7	25,31	24,99
	Desember	42,69	42,03	0	35,13	29,67	39,53	44,35	24,-	25,355
1969	Januari	0	40,16	30,12	31,12	32,37	41,87	37,74	282,5	25,23
	Februari	42,225	38,66	28,875	30,1	32,75	53,19	33,91	44,31	25,47
	Maret	41,6	36,4	31,37	29,22	33,12	48,63	32,22	39,5	28,4
	April	38,775	35,67	30,75	28,7	30,75	44,42	35,-	44,-	31,6
	Mei	34,21	34,06	30,25	27,25	26,25	44,68	34,-	45,-	32,61
	Juni	33,15	35,75	30,-	28,67	27,33	40,-	34,-	43,75	30,75
	Juli	36,33	38,26	31,83	29,21	33,5	37,6	32,39	47,5	29,25
	Agustus	41,14	42	38,25	35,54	35,25	45,6	34,-	43,5	28,75
	September	44,48	44,7	45,-	38,38	39,5	42,62	40,-	34,16	33,-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1970	Oktober	50,725	55	48,9	45,5	43,25	42,1	41,9	42,275	34,625
	Nopember	48,81	52,98	54,66	47,71	44,125	40,25	41,125	42,5	35,125
	Desember	51,04	50,67	55,-	48,38	44,5	38,83	41,3	46,-	40,3
	Januari	58,65	54,93	52,29	47,23	46,-	44,8	41,-	51,31	42,18
	Februari	57,25	53,34	49,17	46,73	47,5	48,87	34,75	53,8	43,75
	Maret	52,94	46,57	44,06	40,44	42,86	44,8	35,25	52,5	42,3
	April	48,43	42,19	41	36,76	34,28	52,9	37,5	54,-	41,675
	Mei	44,61	42,62	40,97	37,14	35,29	56,75	37,87	50,25	39,175
	Juni	43,75	41,6	41,-	37,2	35,-	56,62	41,5	51,8	37,3

Tabel 1 Harga Beras Bulanan Dibeberapa Kota Terpenting Tahun 1968-1970 (Dalam Rp. Per. Kg)

Sumber :

Soeharto, 1970: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)*, Jakarta, Departemen Penerbangan Republik Indonesia, hlm. 101.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN V

Tahun	Pajak Langsung					
	Pendapatan	Persero	MPO	Ipeda (b)	Lain-lain	Total
1969/70	6	8	8	c.a.	0	22
1970/71	5	8	7	t.a.	0	19
1971/72	6	8	8	t.a.	0	22
1972/73	6	8	8	4	1	26

Tahun	Pajak Tidak Langsung									
	Penjualan	Cukai	Penjualan Impor	Ekspor	Bea Masuk	Total Pajak Perdagangan LN	Lain- lain (d)	Total (Pajak Tidak Langsung	Penerimaan Pajak	Total
1969/70	8	16	8	4	30	(42)	11	76	2	100
1970/71	7	14	7	9	26	(43)	13	76	5	100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1971/72	8	13	8	9	22	(38)	11	70	9	100
1972/73	9	12	9	8	19	(34)	10	65	9	100

Keterangan: a. Angka-angka anggaran.

b. Penerimaan Ipeda tidak dimasukkan ke dalam angka anggaran dan realisasi sebelum 1972/73.

c. Termasuk pajak atau bunga royalti dan deviden serta pajak kekayaan.

d. Angka ini mencakup penerimaan dari penjualan hasil-hasil minyak bumi di dalam negeri dan pajak-pajak tidak langsung yang kurang penting lainnya setelah kenaikan harga minyak dunia, penjualan BBM di dalam negeri justru menerima subsidi, dan angka di dalam APBN menjadi positif.

Tabel II Sumbangan dari Berbagai Unsur Penerimaan Domestik Bukan Minyak 1969/70 (dalam persen)

Sumber :

Anne Booth Anne dan Peter McCawley, 1982: *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta, PT. Djaya Pirusa, hlm. 172.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN VI

Sektor Kegiatan Ekonomi (kode ISIC 1968)	Pendidikan yang ditamatkan							Jumlah
	Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	Sekolah Dasar	SLTP	SLTA	Akademi dan Universitas	Tak Terjawab	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1	11.586.730	12.360.222	6.624.745	798.297	168.811	6.594	0	31.545.399
2	24.717	52.342	22.865	10.155	10.641	1.999	0	122.719
3	1.186.052	1.504.795	813.391	196.654	142.756	11.912	0	3.855.568
4	535	522	6.866	768	4.660	0	0	13.348
5	103.230	327.292	255.924	69.530	48.664	1.388	0	805.978
6	2.623.258	2.770.415	1.619.121	450.087	227.784	17.866	0	7.708.531
7	185.841	441.714	426.685	154.657	65.614	14.073	0	1.288.584
8	736	4.855	6.948	8.495	18.363	3.298	0	42.695
9	961.874	1.679.776	1.510.860	842.992	1.209.356	189.900	0	6.394.758
0	0	1.578	423	423	0	423	0	2.847
Jumlah	16.672.970	19.143.511	11.287.828	2.532.058	1.896.649	247.343	0	51.780.359

Tabel III Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang ditamatkan.

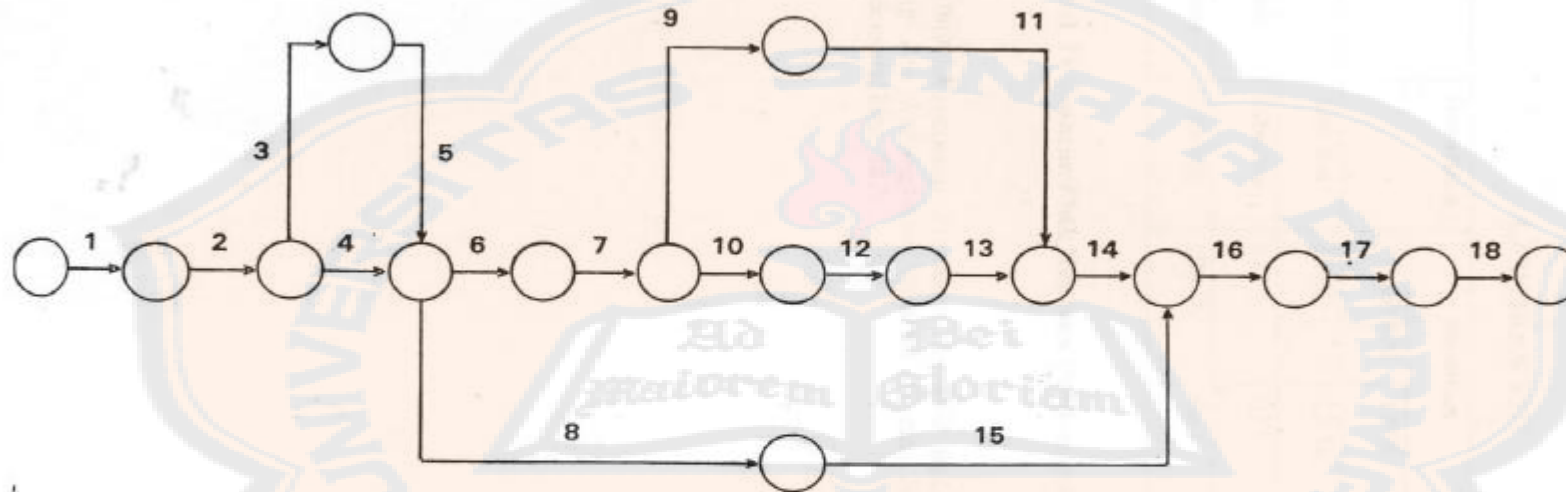
Sumber :

Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, 1984: *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I-Pelita II-Pelita III*, Jakarta, PT. Dumas Sari Warn, hlm. 2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN VII

PROSES PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI



- | | |
|------------------------|--|
| 1. PENGUMPULAN DATA | 10. PEMETAAN/TATA RUANG |
| 2. PERKIRAAN KEADAAN | 11. PENDAFTARAN |
| 3. SURVAI DAERAH ASAL | 12. PENGUKURAN/PEMBUKAAN TANAH |
| 4. SURVAI DAERAH TRANS | 13. BANGUNAN/PRASARANA |
| 5. PROYEKSI PEMINDAHAN | 14. PEMINDAHAN/PENEMPATAN |
| 6. PROPOSAL PROYEK | 15. PENYELESAIAN HAK-HAK TANAH |
| 7. APPRAISAL PROYEK | 16. BINSOSEK, BINSOSBUD, PENYULUHAN |
| 8. PENYEDIAAN AREAL | 17. EVALUASI PROYEK PERSIAPAN DAN PENYERAHAN |
| 9. PENERANGAN KHUSUS | 18. PENYERAHAN PROYEK |

Sumber:

Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, 1984: *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I-Pelita II-Pelita III*, Jakarta, PT. Dumas Sari Warn, hlm. 7.

LAMPIRAN VIII

Sektor	Kesatuan	Sasaran		Persentase
		1969/1970	1973	Kenaikan
Beras	Juta ton	10,52	15,42	46,5 %
Kelapa Sawit	Ribu ton	172	275	59,8%
Minyak Bumi	Juta bbl	293	440	50,1 %

Tabel IV Sasaran Fisik Rencana Pembangunan Lima Tahun

Sumber :

Soeharto, 1969: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, Jakarta, Yayasan Veteran Republik Indonesia, hlm. 387.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas/Semester : XII/IPS/Semester 1

Tahun Pelajaran : 2008/2009

Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Perjuangan Sejak Orde Baru Sampai Dengan Masa Reformasi.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Belajar	Indikator	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber Bahan/ Media
				Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan		
2.1 Menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru	A. Latar belakang sosial ekonomi Soeharto. 1. Latar belakang pendidikan 2. Latar belakang perjalanan karir militer	• Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang latar belakang sosial	• Mendeskripsikan latar belakang sosial ekonomi Soeharto.	Non tes	• Laporan hasil diskusi siswa.	1. Siswa menyerahkan laporan hasil diskusi tentang latar belakang sosial ekonomi	2 X 45 menit	• Anne Booth dan Peter McCawley, 1982, <i>Ekonomi Orde Baru</i> , Jakarta : PT. Djaya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Soeharto.	ekonomi Soeharto.				Soeharto?		Pirusa.
					<ul style="list-style-type: none"> • Lembar pengamatan/observasi (untuk guru). 	2. Lihat lembar observasi (RPP).		<ul style="list-style-type: none"> • Mohtar Mas'ood, 1989, <i>Membangun dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971</i>, Jakarta :
B.	Kebijakan Soeharto dalam Repelita 1 (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang kebijakan Soeharto dalam Repelita I 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan kebijakan Soeharto dalam Repelita 1 (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial. 	Non tes	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil diskusi siswa. 	3. Siswa menyerahkan laporan hasil diskusi tentang kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973)		<ul style="list-style-type: none"> • O.G. Roeder, 1969, <i>Soeharto Dari Prajurit Sampai Presiden</i>,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		(1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.				di bidang ekonomi, dan sosial ?		Jakarta : PT. Gunung Agung.
								- _____, 1976, <i>Anak Desa Biografi Presiden Soeharto</i> , Jakarta : PT. Gunung Agung.
C. Sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.	• Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang sumbangan Soeharto	• Mendeskripsikan sumbangan Soeharto dalam Repelita 1 (1968-1973) di bidang	Non tes	• Lembar pengamatan/observasi (untuk guru).	• Laporan hasil diskusi siswa.	4. Lihat lembar observasi (RPP).	5. Siswa menyerahkan laporan hasil diskusi tentang sumbangan Soeharto dalam	• Soeharto, 1969, <i>Keputusan Presiden Republik Indoensia</i>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>Refleksi:</p> <p>1. Nilai-nilai penting yang dapat diambil dari peranan Soeharto dalam pembangunan</p>	<p>dalam Repelita 1 (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siswa mencari dan menjelaskan secara lisan tentang nilai-nilai/ 	<p>ekonomi, dan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan nilai-nilai penting yang dapat diambil oleh siswa dari 	<p>Tes</p>	<p>Lisan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lembar pengamatan/ observasi (untuk guru). 	<p>Repelita 1 (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial ?</p> <p>6. Lihat lembar observasi (RPP).</p> <p>1. Jelaskan nilai-nilai/ pelajaran penting yang dapat anda peroleh dari peranan</p>	<p><i>Dalam Indonesia Menyongso ng Era Kebangkitan Nasional Kedua, Jakarta : Yayasan Veteran Republik Indonesia.</i></p> <p>_____, 1970, <i>Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik</i></p>
--	--	--	--	------------	---	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973).</p> <p>Aplikasi :</p> <p>1. Dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia pada saat Repelita I (1968-1973) dengan</p>	<p>pelajaran penting dari peranan Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973).</p> <p>• Siswa mencari dan menjelaskan secara lisan dampak dari pembangunan ekonomi</p>	<p>peranan Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973).</p> <p>• Menjelaskan dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I</p>	<p>Tes</p>	<p>Lisan</p>	<p>Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973) ?</p> <p>2. Berilah contoh dampak pembangunan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia pada</p>	<p><i>Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970), Jakarta : Departemen Penerbangan Republik Indonesia.</i></p>
--	--	---	---	------------	--------------	--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini.</p> <p>Afektif :</p> <p>1. Menghayati kepemimpinan Soeharto dalam membangun pemerintahan Indonesia, khususnya</p>	<p>Indonesia pada saat Repelita I (1968-1973) dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini.</p> <p>Siswa menunjukkan contoh kepemimpinan Soeharto yang dapat diterapkan</p>	<p>(1968-1973) dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini.</p> <p>Menunjukkan contoh kepemimpinan Soeharto yang dapat diterapkan untuk</p>	<p>Tes</p>	<p>Lisan</p>	<p>Repelita I (1968-1973) dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini.</p> <p>3. Berilah contoh positif dari sikap kepemimpinan Soeharto yang masih relevan untuk</p>	<p>_____, 1989, <i>Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., Jakarta : P.T. Lamtoro Gung</i></p>
--	--	---	--	------------	--------------	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	dalam bidang ekonomi.	untuk mengembangkan jati diri.	mengembangkan jati diri.			diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mengembangkan jati diri siswa.		<p>Persada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, 1984, <i>Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I-Pelita II-Pelita III</i>, Jakarta : PT. Dumas Sari Warn. • Yahya Muhai'min, 1990, <i>Bisnis</i>
--	-----------------------	--------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

								<p><i>dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980, Jakarta : LP3ES.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Foto Presiden Soeharto.• Data-data perkembang an ekonomi Indonesia tahun 1968- 1973.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 28 Agustus 2008
Guru Mata Pelajaran

Drs. B. Musidi, M.Pd.
NIP

Ari Trijayanti



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

Mata Pelajaran : Sejarah

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas/ Semester : XII/IPS/Semester I

Tahun Pelajaran : 2007/2008

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

I. Standar Kompetensi

Menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa Reformasi.

II. Kompetensi Dasar

Menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru.

III. Materi Pokok

1. Latar belakang sosial ekonomi Soeharto.
2. Kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.
3. Sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.

IV. Indikator

1. Menjelaskan latar belakang sosial ekonomi Soeharto.
2. Menjelaskan kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial
3. Menjelaskan Sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.
4. Menjelaskan nilai-nilai penting yang dapat diambil oleh siswa dari peranan Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973).

5. Menjelaskan dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973) dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini.
6. Menunjukkan contoh positif dari kepemimpinan Soeharto yang dapat diterapkan untuk mengembangkan jati diri siswa.

V. Kegiatan Belajar

1. Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang latar belakang sosial ekonomi Soeharto.
2. Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.
3. Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial.
4. Siswa mencari dan menyebutkan secara lisan tentang nilai-nilai penting yang dapat diambil dari peranan Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973).
5. Siswa mencari dan menyebutkan secara lisan tentang dampak ekonomi yang dialami masyarakat dari pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973) dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini.
6. Siswa menunjukkan contoh positif dari kepemimpinan Soeharto yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mengembangkan jati diri.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

A. Pendahuluan (Apersepsi)

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan mengajak para siswa berdoa, kemudian mengabsen kehadiran siswa.
2. Tanya jawab materi pelajaran sebelumnya.
3. Menginformasikan esensi kompetensi dasar dan relewan bahan ajar.

B. Kegiatan Inti

1. Orientasi

- Guru memberikan penjelasan tentang materi yang akan dibahas dan memberikan sumber buku yang digunakan.

2. Latihan (diskusi)

- Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa, salah satu diantaranya dijadikan ketua kelompok.
- Setiap kelompok diberi tugas untuk berdiskusi membahas permasalahan yang berbeda dalam waktu 20 menit, dan membuat laporan tertulis untuk dipresentasikan. Permasalahan yang dibahas adalah :

1. Jelaskan latar belakang sosial ekonomi Soeharto ?
2. Jelaskan kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial ?
3. Jelaskan sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial ?

3. Umpan balik

- Setelah diskusi kelompok selesai, ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan siswa yang lain diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi.

4. Tindak lanjut guru

- Guru mengklarifikasi jawaban yang kurang tepat dan memberi penguatan pada jawaban yang benar.
 - Guru meminta pendapat secara lisan kepada siswa tentang permasalahan-permasalahan berikut :
1. Jelaskan nilai-nilai penting yang dapat anda peroleh dari peranan Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada Repelita I (1968-1973)?
 2. Jelaskan dampak dari pembangunan ekonomi yang dialami masyarakat dari pembangunan ekonomi Indonesia pada

Repelita 1(1968-1973) dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini?

3. Tunjukkan contoh positif dari kepemimpinan Soeharto yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mengembangkan jati diri anda?

C. Penutup

- Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari.
- Masing-masing siswa mengumpulkan laporan tertulis hasil diskusi.
- Guru menginformasikan materi pelajaran untuk pertemuan berikutnya.
- Berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran.

VII. Metode Belajar

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Presentasi
4. Tanya Jawab.

VIII. Media dan Sumber Belajar

A. Media : OHP/Viewer, foto, dan data-data perkembangan ekonomi Indonesia pada Repelita 1 (1968-1973).

B. Sumber Belajar :

- Booth, Anne dan Peter McCawley, 1982, *Ekonomi Orde Baru*, PT. Jakarta : Djaya Pirusa.
- Roeder, O.G, 1976, *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Soeharto, 1969, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, Jakarta : Yayasan Veteran Republik Indonesia.
- _____, 1970, *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan*

Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970), Jakarta : Departemen Penerbangan Republik Indonesia.

- _____, 1989, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi* seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., Jakarta : P.T. Lamtoro Gung Persada.
- Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, 1984, *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I-Pelita II-Pelita III*, Jakarta : PT. Dumas Sari Warn.
- Yahya Muhaimin, 1990, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta : LP3ES.

IX. Penilaian

1. Penilaian Proses belajar

Alat penilaian : Lembar observasi

Bentuk : Format penilaian

CONTOH FORMAT PENILAIAN DALAM DISKUSI

Nama	Pembawaan atau penampilan	Kerja sama	Mempresen tasikan Hasil	Menjawab pertanyaan	Tanggung Jawab	Jumlah Skor
Ida						
Bagoes						
Oka						
Suseno						
Wiseno						
Nyoman						
Ardian						
Amanda						
Tsani						

Keterangan :

- a. Kolom dalam contoh format di atas adalah bagian dari kegiatan diskusi yang diamati oleh guru.
- b. Setiap kolom diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1 : Sangat kurang
 - 2 : Kurang
 - 3 : Cukup
 - 4 : Baik
 - 5 : Sangat baik

2. Penilaian Hasil Belajar

- a. Alat penilaian : Non Tes
Bentuk penilaian : Laporan hasil diskusi kelompok
Butir-butir pertanyaan diskusi :
 1. Jelaskan latar belakang sosial ekonomi Soeharto ?
 2. Jelaskan kebijakan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial ?
 3. Jelaskan sumbangan Soeharto dalam Repelita I (1968-1973) di bidang ekonomi, dan sosial ?
- b. Alat penilaian : Tes uraian
Bentuk penilaian : Tertulis
Butir-butir soal :
 1. Jelaskan latar belakang pendidikan Soeharto ?
 2. Jelaskan latar belakang perjalanan karir militer Soeharto ?
 3. Bagaimana keadaan perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto ?
 4. Bagaimana langkah-langkah Soeharto dalam meningkatkan produksi pangan di Indonesia ?
 5. Bandingkan kondisi kehidupan keagamaan pada masa pemerintahan Orde Baru dengan kehidupan sekarang ?

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 28 Agustus 2008
Guru Mata Pelajaran

Drs. B. Musidi, M.Pd
NIP-----

Ari Trijayanti



LAMPIRAN III

LAMPIRAN VII

Sumber:

Sri Harimulya dan Ngasup Singarimbun, 1984: *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I-Pelita II-Pelita III*, Jakarta, PT. Dumas Sari Warn, hlm. 7.

Sumber:

Soeharto, 1970: *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970: Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)*, Jakarta, Departemen Penerbangan Republik Indonesia, hlm. 101.